

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH OLEH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

RONALD PIRADE

NIM. 500896082

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Pebruari 2018

Yang Menyatakan



RONALD PIRADE
NIM. 500896082

ABSTRAK

PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALINAU

Ronald Pirade
ronaldpirade@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau. Fokus Penelitian yang ditetapkan adalah pelatihan keterampilan kepada pelaku industri kecil dan menengah, pemberian bantuan dana modal usaha, pemberian bantuan sarana produksi, memberikan fasilitasi pemasaran melalui pameran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan dan key informan serta data sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara dengan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau serta para pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari pendapat Miles dan Huberman yaitu analisis data model interaktif. Hasil Penelitian menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan pembinaan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau belum optimal hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan pelatihan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, bantuan modal bergulir tidak menghasilkan peningkatan usaha IKM yang signifikan, bantuan peralatan produksi tidak memeningkatkan kualitas dan jumlah produksi, promosi/pameran belum meningkatkan jumlah hasil penjualan. Faktor faktor yang menghambat terhadap pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah: Terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga apapun yang diinginkan selalu mengharap bantuan dari pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan, dan Kondisi geografik Kabupaten Malinau.

Kata Kunci: Pembinaan Industri Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRACT

SMALL AND MEDIUM INDUSTRY DEVELOPMENT BY THE DEPARTEMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF MALINAU DISTRICT

Ronald Pirade
ronaldpirade@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study aims to analyze the Development of Small and Medium Industry conducted by the Department of Industry and Trade of Malinau District. The focus of the research is skill training for small and medium industry actors, providing business capital funding, providing production facilities, providing marketing facilitation through the exhibition. The data used in this study are primary data obtained from informants and key informants and secondary data. The primary data were processed from interviews with employees at the Malinau District Office of Industry and Trade and the perpetrators of Small and Medium Industry in Malinau District. Data analysis used in this research is taken from Miles and Huberman's opinion that is interactive data model analysis. The result of the research shows that in general the implementation of Small and Medium Industry guidance conducted by Departement of Industry and Trade Malinau District has not been optimum it can be seen from the result which was reached after the implementation of coaching through the training activity the result was not as expected, the revolving capital aid did not result in the improvement of Small and Medium Industry significant, the aid of production equipment does not improve the quality and quantity of production, promotion / exhibition has not increased the amount of sales proceeds. Factors that hamper the implementation of Small and Medium Industry Development by Departement of Industry and Trade Malinau District are: Limited budget allocation for the need of Small and Medium Industry development activities so that not all planned program activities can be implemented, the attitude and behavior of small and medium industry that seem spoiled so that whatever it is desirable to expect government assistance, the characteristics and mindset of Small and Medium Industry actors are not easy to change, lack of careful planning in the implementation of activities, and geographical condition of Malinau District.

Keywords: Development of Small and Medium Industry, Department of Industry and Trade

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten malinau

Penyusun TAPM : Ronald Pirade

NIM : 500896082

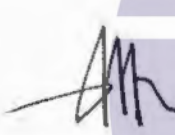
Program Studi : Magister Administrasi Publik

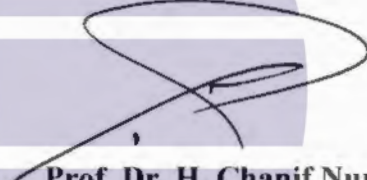
Hari / Tanggal : Senin, 19 Februari 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si
NIP. 196705191987012001


Prof. Dr. H. Chanif Nurcholis, M.Si
NIP. 195902021992031002

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial,
dan Politik dan Mengelola program
Magister Administrasi Publik

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 1959102719860311003



Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D
NIP. 196407221989031019

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ronald Pirade
NIM : 500896082
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten malinau

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka
pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Februari 2018
Waktu : 13:20 – 15:00 WITA

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Abdul Aziz Sanapiah, S.E., MPA.

Pembimbing I

Nama : Prof. Dr. H. Chanif Nurcholis, M.Si

Pembimbing II

Nama : Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Proram Pascasarjana (PPs) dan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Dimana dalam kesempatan ini Penulis menyadari masih memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam penyusunan TAPM dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu dengan merendahkan hati mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk kesempurnaan tulisan ini dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan bantuan dalam penulisan TAPM ini.

Penulis menyadari pula bahwa tanpa adanya bantuan dari herbagai pihak dalam penyusunan TAPM ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka;

4. Bapak Dr. Sofjan Arifin, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan selaku penyelenggara Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik;
5. Bapak Prof. Dr. Chanif Nurholis, M.Si selaku Pembimbing I, dyang telah banyak memberikan pctunjuk dan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan TAPM ini;
6. Ibu Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan terkait perbaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
7. Pemerintah Kabupaten Malinau atas Izin Belajar dan Ijin Penelitian yang telah diberikan;
8. Kepada istriku tercinta dan anak-anakku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat baik moril maupun materil yang tidak pernah putus-putusnya diberikan kepada penulis selama proses pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
9. Seluruh rekan – rekan Program Pascasarjana Universitas Terbuka Kelas Malinau Angkatan I atas kebersamaan dan suportnya.

Akhirnya Penulis berharap semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri maupun kepada pihak yang memerlukannya.

Tarakan, Pebruari 2018

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ronald Pirade
NIM : 500649082
Tempat/Tanggal Lahir : Tana Toraja, 02 September 2017
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. Intimung RT. XII Desa Malinau Kota
Telepon : 08115936384
Nama Istri : Yennie Erlena
Nama Anak : Aaron Matthew Pirade,
Harell Tadem Pirade

Riwayat Pendidikan

1. SDN O29 di Tana Toraja Sulawesi Selatan, Lulus Tahun 1992;
2. SMPN 11 di Samarinda Kalimantan Timur, Lulus Tahun 1995;
3. SMA Katolik di Samarinda Kalimantan Timur, Lulus Tahun 1998;
4. Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, Lulus Tahun 2003

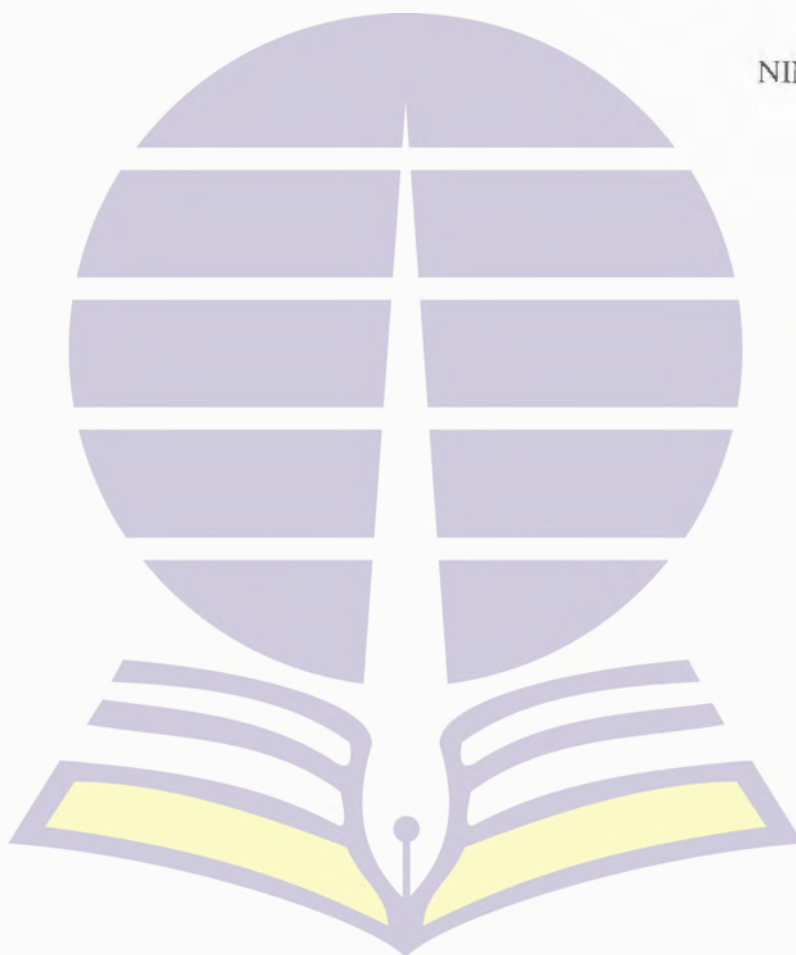
Riwayat Pekerjaan

1. Tahun 2004 s/d 2005 sebagai PPL di Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;

2. Tahun 2006 s/d sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malinau.

Tarakan, Pebruari 2018

Ronald Pirade
NIM : 500698082

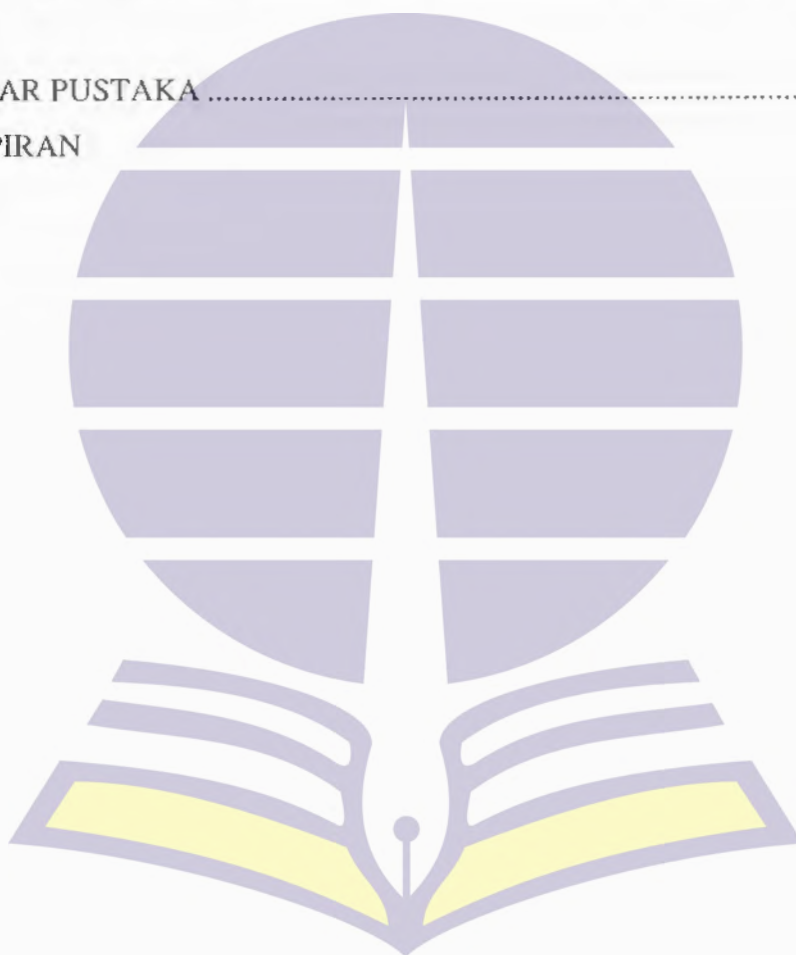


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TAPM	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kebijakan Publik	10
1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2 Implementasi Kebijakan Publik	13
3 Model Implementasi Kebijakan Publik	16
B Konsep Pembinaan dan Pengembangan	23
1 Pengertian Pembinaan	23
2 Konsep Pengembangan	24
3 Pembinaan dan Pengembangan IKM	27
C Konsep Industri Kecil dan Menengah (IKM)	33
1 Pengertian Industri Kecil dan Menengah (IKM)	33
2 Karakteristik IKM di Indonesia	36
3 Program Pembinaan IKM	38

D	Penelitian Terdahulu	44
E	Kerangka Fikir	47
F	Operasional Konsep	48
BAB III METODE PENELITIAN		49
A	Jenis Penelitian.....	49
B	Fokus Penelitian	49
C	Lokasi Penelitian	50
D	Instrumen Penelitian.....	51
E	Sumber Data	51
F	Teknik Pengumpulan Data	53
G	Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		57
A.	Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57
1	Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57
2	Keadaan Sumber Daya Manusia	59
3	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disperindag	61
5	Data IKM Kabupaten Malinau	63
B.	Penyajian Data Hasil Penelitian	64
1	Pembinaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	65
a.	Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan /SDM Melalui Pelatihan	68
b.	Pemberian Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi	72
c.	Memberikan Fasilitas Pemasaran Melalui Pameran	79
2	Faktor-faktor yang Menghambat Pembinaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau.....	82
C.	Pembahasan	83
1	Pembinaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	84
a.	Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan /SDM Melalui Pelatihan	84

b. Pemberian Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi	88
c. Memberikan Fasilitas Pemasaran Melalui Pameran	90
2 Faktor-faktor yang Menghambat Pembinaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A Kesimpulan	94
B Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	



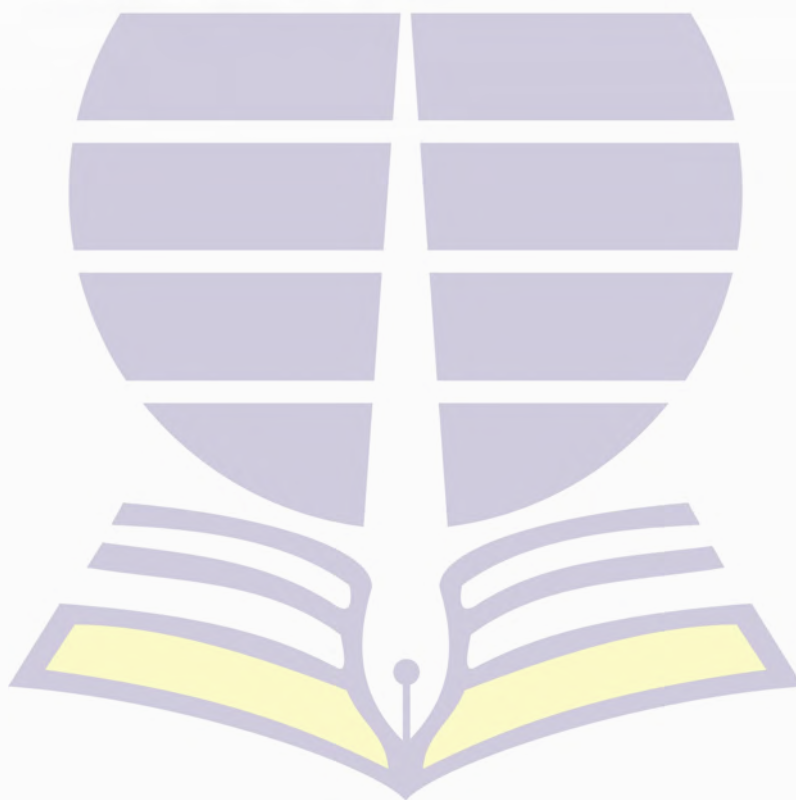
DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.1.	Daftar Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau Tahun 2012 - 2016	5
4.1.	Daftar Sumber Daya Aparatur PNS dan PTT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau Tahun 2016	60
4.2.	Jumlah Investasi Sektor Industri Tahun 2016	64
4.3.	Program Kegiatan Pembinaan IKM Disperindag Kab. Malinau Tahun 2012-2016	66
4.4.	Kegiatan Pelatihan Disperindag 2012-2016	70
4.5.	Bantuan Modal Usaha Disperindag 2012-2016	76
4.6.	Bantuan Peralatan Produksi Disperindag 2012-2016	78
4.7.	Data Pelaksanaan Promosi/Pameran Dinas Perindag Kab. Malinau Tahun 2012 – 2016	80



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Kerangka Analisis Implementasi	17
2.2.	Implementasi Kebijakan Model Proses/Alur	20
2.3.	Alur Pikir Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	47
3.1.	Analisis Data Model Interaktif	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanah kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Seiring dengan disempurnakannya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah guna terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Yang perlu diperhatikan adalah apakah kebijakan pemerintah itu akan menghasilkan otonomi lokal yang mumpuni mengingat bahwa kebijakan

otonomi daerah selama ini senantiasa dirumuskan dari atas ke bawah dan dipandang sebagai bagian dari suatu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Untuk meluruskan pandangan tersebut pemberdayaan potensi lokal harus dimulai dari level pemerintah daerah paling bawah, sehingga pembangunan seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat atau daerah.

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Sub sektor IKM merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah yang bergerak dalam berbagai sektor ekonomi. Sehingga jumlah IKM sangat banyak dan tersebar disemua sektor ekonomi dan diseluruh wilayah Indonesia. Karena tersebar diberbagai sektor dan wilayah maka sektor IKM dapat menyerap banyak tenaga kerja secara merata disemua wilayah. Jenis IKM yang berkembang pun beraneka ragam karena keanekaragaman budaya Indonesia.

Selain itu, Industri Kecil Menengah (IKM) adalah usaha yang mempunyai ketahanan akan krisis ekonomi. Hal ini terbukti saat terjadi krisis tahun 1998, IKM bisa bertahan dari keterpurukan yang dialami usaha besar lainnya. Bahkan jumlah IKM semakin meningkat paska terjadinya krisis. Faktor pendukung IKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah: (1) sebagian besar IKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, (2) sebagian besar IKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Sehingga pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap IKM, (3) terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya. Sehingga pengangguran yang ada melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah IKM semakin meningkat (Partomo, 2004).

Peran sektor IKM sebagai pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, membuat sektor ini lebih banyak berkembang di daerah pedesaan seperti Kabupaten Malinau yang mayoritas penduduknya memiliki ekonomi menengah kebawah. Dengan kondisi ekonomi yang lemah, masyarakat Kabupaten Malinau berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan berbagai kegiatan usaha berskala kecil atau menengah yang tidak membutuhkan banyak modal. Sedangkan untuk membentuk usaha dalam skala besar, masyarakat tidak memiliki modal yang cukup. Hal inilah yang membuat masyarakat pedesaan lebih mengembangkan sektor IKM daripada membentuk industri besar. Selain itu, IKM mampu menyerap tenaga kerja dengan kualitas

pendidikan. Meskipun pengembangan industri-industri besar dapat menyerap tenaga kerja, tetapi untuk memasuki pasar tenaga kerja sektor industri besar, diperlukan keterampilan-keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sedangkan IKM yang menggunakan teknologi sederhana memungkinkan masyarakat dengan pendidikan rendah untuk melakukan kegiatan usahanya. Dengan demikian, tenaga yang tidak terserap oleh usaha besar dan sektor ekonomi lainnya mampu diserap oleh IKM.

Berdasarkan hasil pengamatan, sektor IKM yang berkembang di Kabupaten Malinau sangat beraneka ragam, mulai dari kerajinan anyaman rotan, bambu, mebel, hingga bahan-bahan bangunan seperti batu bata. IKM ini berupa industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Industri rumah tangga yang paling banyak jumlahnya adalah industri kerajinan dan makanan olahan, misalnya industri kerajinan anyaman rotan, industri kerajinan anyaman bambu, industri tempe mentah, industri tempe kripi, serta industri krupuk.

IKM yang ada di Kabupaten Malinau mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar.

Jumlah penduduk Kabupaten Malinau tahun 2016 berdasarkan sumber Malinau Dalam Angka Tahun 2016 sebanyak 80.618 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 43.374 jiwa dan penduduk perempuan 37.244 jiwa. IKM

merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Sektor IKM ini diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sehingga dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Perkembangan sektor IKM di Kabupaten Malinau dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Daftar Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah unit usaha	339	347	529	632	663
2.	Nilai Investasi (000.000)	18.425	20.000	20.566	22.566	28.344,590

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau 2016

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, bahwa perkembangan sektor IKM di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Berdasarkan data perkembangan ini, maka dapat menjadi bahan evaluasi atas pembinaan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan menengah, diantaranya pelatihan, promosi, bantuan modal melalui dana bergulir, bantuan sarana produksi, namun upaya pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku industri kecil dan menengah selama ini.

Namun, tidak selaras dengan perannya yang begitu penting. Permasalahan-permasalahan yang membelit IKM masih begitu banyak.

Seperti misalnya, permasalahan teknologi, permodalan, manajemen, pemasaran, kesulitan dalam mengakses kredit perbankan komersial dan masalah lingkungan. Dari permasalahan yang begitu kompleks tersebut, berakibat pada kinerja IKM yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kinerja Industri Besar (Anshori, 2005).

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam melakukan pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah untuk memberikan perubahan pelaku IKM dari kondisi masa kini menuju kondisi masa depan. Dengan demikian diharapkan pembinaan terhadap IKM di Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka berbagai kebijakan pengembangan IKM di Kabupaten Malinau tersebut selama ini perlu diperiksa dan dirumuskan kembali agar mempercepat pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku IKM, karena dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman kepada pelaku IKM baik dari segi kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial. Akan tetapi dari segi hasil yang diperoleh pasca pelatihan sebagian besar pelaku IKM belum dapat mengaplikasikan secara maksimal.

Bantuan Modal usaha untuk industri kecil dan menengah sangat diharapkan membantu IKM dalam mengembangkan usahanya. Bantuan permodalan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terhadap pelaku IKM untuk mengembangkan usahanya. Tetapi kenyataannya usaha IKM tidak mengalami peningkatan setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemerintah Kabupaten Malinau.

Bantuan sarana produksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau diharapkan sangat membantu pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas produknya, sehingga produk yang dihasilkan dapat meningkat kualitasnya. Namun demikian masih terdapat permasalahan terkait pemberian peralatan produksi kepada IKM yaitu kualitas produk yang dihasilkan tidak meningkat dan terdapat peralatan yang diberikan kepada IKM tidak dapat difungsikan.

Kegiatan promosi/pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu kegiatan yang sangat digemari dan diminati oleh pelaku IKM, apalagi kalau promosi/pameran dilaksanakan diluar daerah. Manfaat yang dapat diperoleh oleh IKM pada saat pameran adalah menjalin kerja sama pemasaran dan bahan baku, serta dapat melihat, membandingkan dan mengadopsi inovasi produk yang ditampilkan daerah lain. Kenyataan yang terjadi adalah peningkatan penjualan yang didapatkan IKM hanya sebatas pada saat pameran saja, akan tetapi setelah pasca pameran tidak terjadi peningkatan penjualan. Padahal tujuan utama dilaksanakannya kegiatan pameran adalah untuk mempromosikan potensi produk unggulan serta membuka peluang investasi daerah, sehingga terjalin kerja sama di bidang pemasaran.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar IKM di Kabupaten Malinau dari Observasi dilapangan adalah sebagai berikut : (1) Faktor Internal; modal yang kurang, SDM yang terbatas, lemahnya jaringan usaha, (2) Faktor Eksternal; iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana usaha dan terbatasnya akses pasar.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mendapatkan jawaban dengan mengadakan penelitian lebih jauh mengenai, **“Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang pembinaan industri kecil dan menengah diatas sebagai latar belakang, maka penulis dapat mengemukakan *problem statement* sebagai berikut “Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malinau belum efektif, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah.

Melihat *problem statement* maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan *problem statemen* diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.
2. Untuk Menganalisis Faktor-faktor yang Menghambat Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sosial terutama pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, terutama dalam upaya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Menurut (Tjokroamidjojo, 1997 : 92), kebijakan dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sunarko, (2001 : 36) kebijakan adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung beberapa unsur, yaitu 1) adanya serangkaian tindakan; 2) dilakukan oleh atau sekelompok orang; 3) adanya pemecahan masalah; 4) adanya tujuan tertentu. Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat

diperoleh suatu pengertian bahwa kebijaksanaan adalah serangkaian fondamental yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Meskipun istilah kebijaksanaan itu dapat berlaku secara umum, namun kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijaksanaan negara (*public policy*). Pengertian kebijaksanaan negara banyak ahli mendefinisikannya sebagaimana halnya pada pengertian kebijaksanaan itu sendiri.

Menurut Dye (dalam Islamy, 1997 : 18) bahwa kebijakan negara sebagai “ *is wjhoever government choose fo do or to do*” (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut dikatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (*obyektif*). Dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “suatu yang dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Pendapat yang berbeda dikemukakan Islamy (1997 : 20) bahwa dalam suatu mengandung beberapa elemen penting antara lain:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijaksanaan negara itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Mencermati tentang produk kebijakan publik yang terpenting adalah pelaksanaannya karena sering terjadi, meskipun kebijakan yang dibuat telah memenuhi persyaratan dalam pembuatan keputusan, tetapi secara implementatif sulit diaplikasikan. Maka dari itu pada taraf implementasi perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : komitmen, konsistensi, sumber daya, perilaku pelaksana, dan faktor penunjang lainnya. Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi.

Menurut Meter dan Horn (1975 dalam Wahab, 1997 : 65) implementasi adalah: *"those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions"* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Webster (dalam Solichin 1997 : 64) secara implentatif kebijakan dapat dirumuskan: "to implement", mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Kalau pandangan itu kita ikuti, maka imlementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden).

Menurut Grindle (dalam Abdul Wahab, 1997 : 125) bahwa "*implementation as process politic and administration*" (implementasi sebagai proses politik dan administrasi). Pandangan Grindle ini setidaknya tidak jauh berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan (enviroment). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses implementasi publik, yaitu : proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran negara. Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan diatas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan kebijakan terdiri atas : (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, (6) sumber daya yang

dilihatkan. Sedangkan konteks implementasinya terdiri atas : (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) keputusan dan daya tanggap. Diluar isi kebijakan dan konteks implementasi, ada tujuan kebijakan, tujuan yang telah dicapai, program aksi dan proyek individu dan dibiayai, program yang dijalankan seperti yang direncanakan, mengukur hasil kebijakan, yang kesemuanya saling berinteraksi satu sama lain dalam pengimplementasian dari suatu kebijakan.

Dari beberapa pendapat di atas kebijakan pada intinya mengandung beberapa unsur, yaitu 1) adanya serangkaian tindakan; 2) dilakukan oleh atau sekelompok orang; 3) adanya pemecahan masalah; 4) adanya tujuan tertentu. Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Dewasa ini studi mengenai implementasi kebijakan telah semakin mendapatkan perhatian, bukan saja dinegara-negara industri melainkan juga telah menjalar di negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia). Oleh karena itu guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan negara kita jangan hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target group*), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku

dari berbagai pihak yang terlibat dalam program dan yang pada akhirnya membawa dampak (yang diharapkan maupun tidak) terhadap program tersebut.

Dengan demikian fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Demikian halnya terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam hubungannya dengan program pembinaan terhadap industri kecil dan menengah, tentunya berharap dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha industri kecil dan menengah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA), asalkan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan dibarengi komitmen yang kuat oleh petugas pelaksana.

Menurut Cleaves (dalam Abdul Wahab, 1997 : 125) menyatakan, bahwa implementasi mencakup “*a process of moving toward a policy objective by mean of administrative and political steps*”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara

nyata dalam meneruskan/mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program tersebut dengan tujuan kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik dapat dikenal melalui 3 (tiga) model yaitu *model top-down*, *model bottom up* dan *model sintesis*. Secara konseptual ketiga model kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

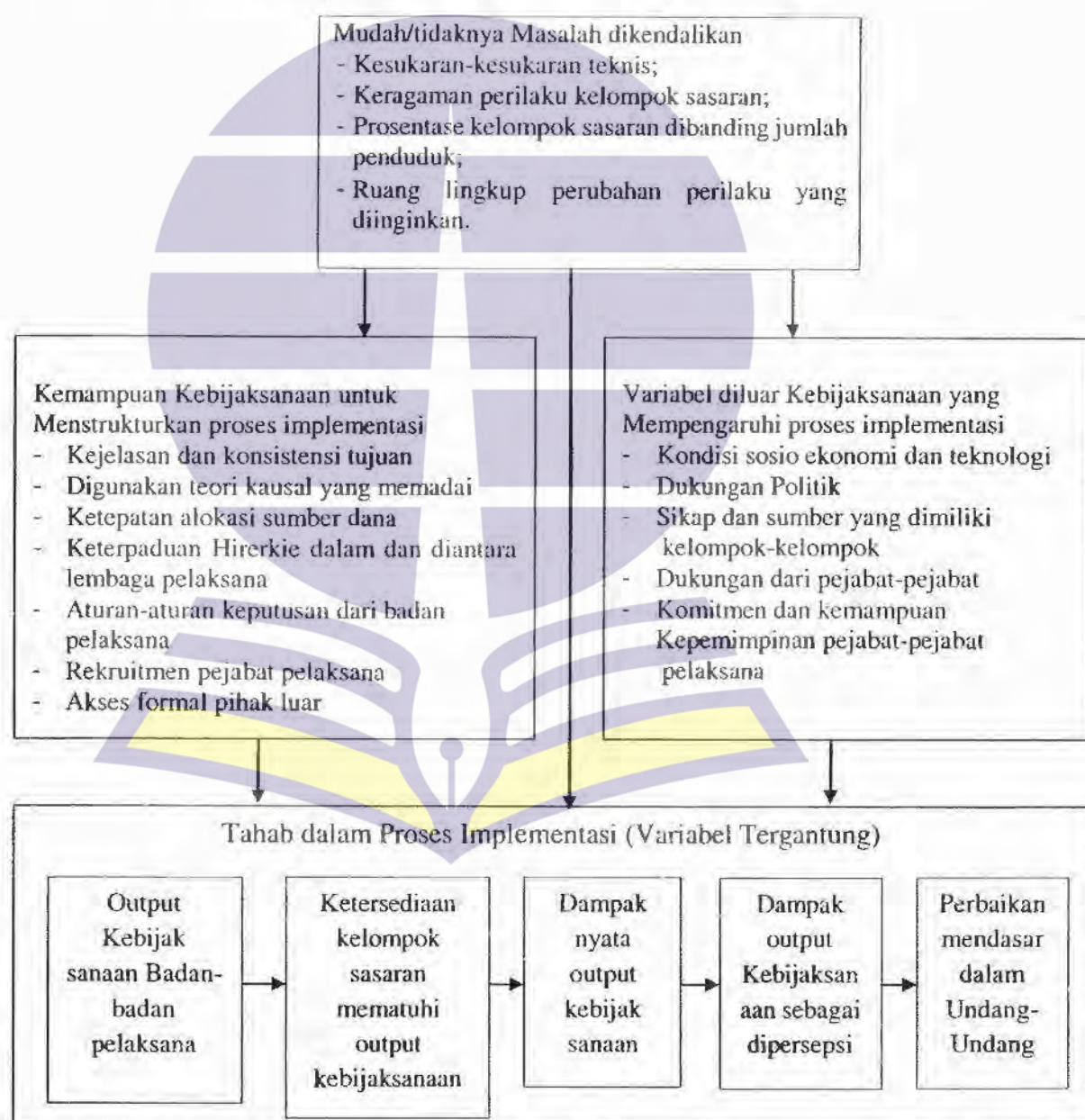
1. Model top-down (Sabatier dan Mazmanian, 1987)

Model kerangka analisis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh kedua ahli ini disebut sebagai *model top down* karena suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis). Inti dari pemikiran Sabatier dan Mazmanian melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai aturan yang mengoprasionalkan kebijakan, (3) faktor-faktor di luar peraturan implementasi yang efektif memerlukan adanya seperangkat kondisi yang optimal. yaitu dimana para implementasi para implementator harus memiliki keahlian secara profesional di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal atau kurang ideal . Walaupun dalam model aslinya

terpusat pada formulasi dengan implementasi keunggulan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, komitmen yang kuat antar aktor yang terlibat.

Inti pemikiran Sabatier dan Mazmanian ini dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2. 1. Kerangka Analisis Implementasi



Sumber : Sabatier dan Mazmanian (dalam Abdul Wahab, 1987 : 22)

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai variabel bebas (*independent variable*), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel tergantung (*dependent variable*), klasifikasi dari variabel tersebut : (1) *the tractability of the problem (s) being addressed*, (2) *the ability of the statute to structure favorably the implementation process*; and (3) *the net effect of a variety of political variables on the balance of support for statutory objectives* (Sabatier dan Mazmanian, 1987 : 21) (a) mudah atau tidaknya permasalahan yang digarap untuk dikendalikan, (b) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, (c) pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan terhadap tujuan yang dimuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut (Abdul Wahab, 1997 : 81) dan dari hubungan ini tiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain, seperti tingkat kesediaan kelompok sasaran dari instansi pelaksana akan berpengaruh terhadap dampak nyata (*actual impact*) dari keputusan-keputusan tersebut.

2. Model *Bottom-up* (Smith (1973), Model Proses/Alur)

Model Smith melihat proses kebijaksanaan dari perspektif perubahan sosial dan politik, kebijakan pemerintah dibuat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Smith lebih lanjut mengemukakan adanya empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan. Dari keempat variabel implementasi kebijakan, terdiri dari: *the idealized policy, the implementing organization, the target group and the environmental factors*.

Kemudian *the formal policy* (termasuk didalamnya), keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah, hukum program, yang diterapkan pemerintah, *the type of policy* (contoh, apakah kebijakan itu kompleks atau sederhana, *organisasional* atau *non organisasional*, *distributive*, *retributive regulatory*, *self-regulatory* atau *emotive-symbolic*, *the program* dan *image of the policy*) :

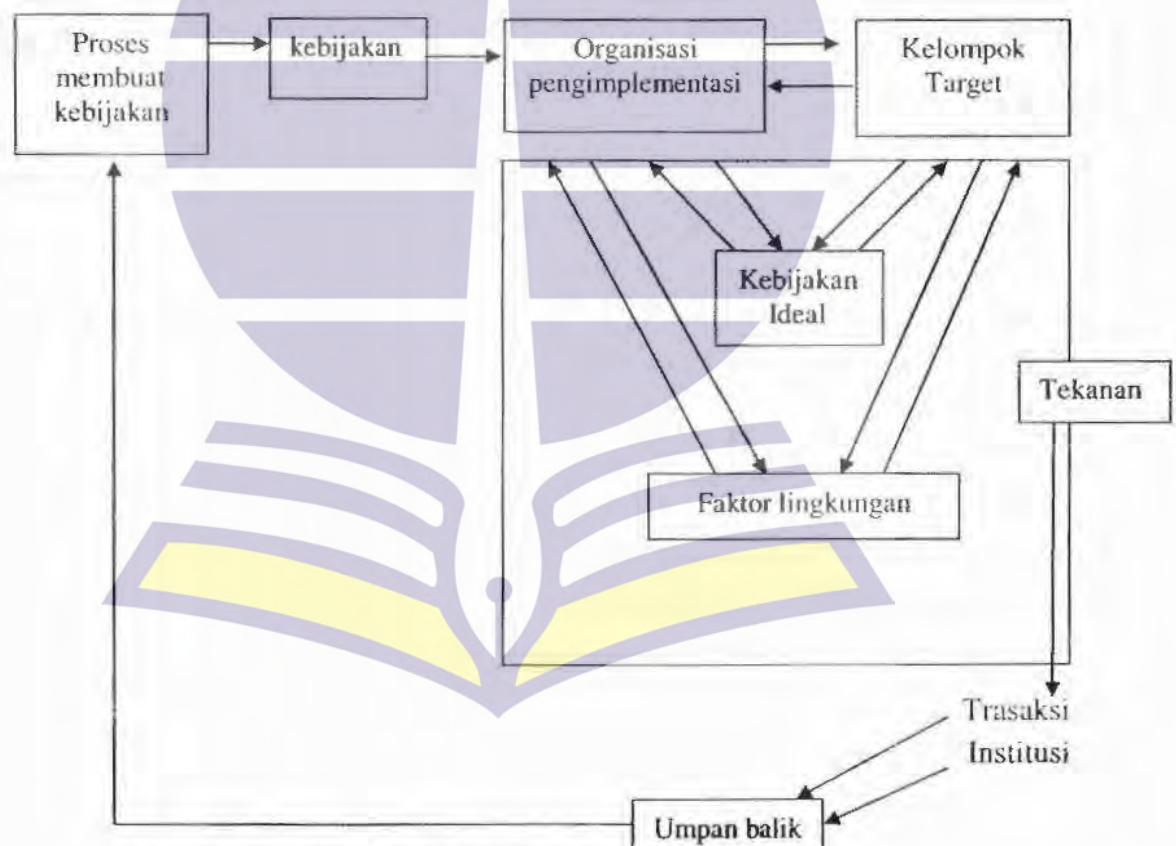
- a. *Idealized policy* adalah suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan berujuan untuk mendorong motivasi, mempengaruhi kelompok sasaran untuk melaksanakannya;
- b. *Implementing organization* adalah unit dari birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab bagi implementasi kebijakan;
- c. *Target group* adalah bagian dari *policy stake holders* yang dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana diharapkan oleh perumus kebijakan, karena mereka banyak mendapat pengaruh dari kebijakan oleh karena itu diharapkan harus dapat mengadaptasi dengan pola-pola perilaku sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan.
- d. *Environmental factor* adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam implementasi kebijakan. Ini berupa kondisi budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Smith mengajukan model teoritisnya dalam bentuk sistemik, jika suatu kebijakan sedang diterapkan, maka interaksi didalam dan diantara keempat komponen diatas dapat mengakibatkan ketidaksesuaian (*discrepancies*) dan ketegangan. Ketegangan akan

menghasilkan pola-pola transaksi yaitu pola-pola yang tidak tetap berkaitan dengan tujuan suatu kebijakan dan pola transaksi tersebut mungkin melahirkan lembaga-lembaga tertentu. Umpan balik dalam bentuk perbedaan ketegangan (*detente*) atau peningkatan ketegangan dikembalikan kedalam matrik dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih singkat dapat dibuat pola dalam gambar berikut :

Gambar 2.2. Implementasi Kebijakan Model Proses/Alur



Sumber : Smith, (dalam Abdul Wahab, 1997 : 203)

Setelah memperhatikan beberapa modal implementasi kebijakan yang diuraikan di atas, maka pada hakekatnya dapat dilakukan dengan tiga kategori pendekatan yaitu (1) pendekatan dengan model "top-

down”, (2) pendekatan dengan model “*bottom-up*” dan (3) pendekatan model sintesis.

- a. Model *top-down* memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik atau linier satu arah, pada tataran diimplementasikan di lapangan harus mengikuti hasil rumusan dan kebijakan yang telah digariskan (tidak peduli dengan dinamika di lapangan). Penganut aliran model *top-down* ini seperti yang dikemukakan oleh “Sabatier dan Mazmanian, Grindle, Hood, Hogwood dan Gunn dan Metter dan Horn dalam uraian terdahulu.
- b. Model *bottom-up* memandang bahwa implementasi kebijakan sebaliknya tidak mekanistik dan linier, tetapi membuka peluang untuk terjadinya transaksi, melalui proses negoisasi, *bagarining* untuk menghasilkan kompromi, peka terhadap dinamika yang berkembang dimasyarakat (khususnya target group) terhadap implementasi kebijaksanaan. Penganut aliran model *bottom-up* ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Smith, (dalam Abdul Wahab, 1997 : 213).
- c. Model Sintesis memadukan dua model tersebut di mana proses implementasi kebijakan mungkin akan efektif bila terjadi perpaduan (sintesis) dari model pendekatan *top down* dengan model pendekatan *bottom up* atau perpaduan antara tanggung jawab dan kepercayaan. Dengan demikian, untuk keperluan telaah akademik, perlu menyilangkan atau memadukan antara dua teori model pendekatan *top-down* dengan teori model pendekatan *bottom up*.

Pengamat model aliran sintesis yaitu Sabatier, Parsons, Porter, Browne dan lain-lain. Dari penganut aliran model *top-down* dan model *bottom-up* tersebut jika diamati terdapat perbedaan yang cukup tajam, Erik-Lane (dalam Nugroho, 2004 : 108) melihat perbedaan tersebut bahwa “*The top-down model emphasize responsibility, the bottom-up models underive trust*” (model *top-down* menekankan pada tanggung jawab dan sebaliknya model *bottom-up* pada kepercayaan).

Memahami adanya perbedaan antara kedua aliran tersebut kelihatannya ada suatu *balance* (keseimbangan) antara kepercayaan dan tanggung jawab. Kepercayaan merupakan modal utama, tetapi kepercayaan tidak dapat menggantikan unsur tanggung jawab dalam implementasi kebijaksanaan, sebaliknya bila tanggung jawab tidak mendapatkan tekanan yang cukup sebagai konsekuensinya, maka akan banyak hambatan, termasuk hambatan pemilihan teknologi alternatif untuk menunjang pencapaian tujuan. Jadi kepercayaan dan tanggung jawab sama-sama dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan, proses implementasi merupakan perpaduan antara kepercayaan dan tanggung jawab. Sehingga tidak ada satu model implementasi kebijaksanaan yang benar-benar menjamin keberhasilan implementasi kebijaksanaan secara efektif.

B. Konsep Pembinaan dan Pengembangan

1. Pengertian Pembinaan

Menurut Miftha Thoha (2001) Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Poerwadarmita (dalam bukhariestyle.blogspot.com : 2012). Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan baik.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

2. Konsep Pengembangan

Menurut Mc Gill (dalam M. Ridwan, 2014 : 27) pengembangan adalah suatu perubahan dari yang mikro menjadi makro. Secara makro pengembangan merupakan suatu peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa, proses peningkatan mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal, hasil ini dapat berupa jasa, benda atau uang. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mangkunegara (2001 : 43) bahwa pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan

dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan menengah.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kematangan berpikir yang dibarengi dengan demikian pengembangan dapat juga diartikan suatu perubahan yang dilakukan secara terencana kearah yang di inginkan.

Berbicara tentang pengembangan terdapat empat aspek yang terkandung didalamnya (Bryant dan White, 1997 ; 4), yaitu :

1. Memberikan penekanan pada kapasitas (*capacity*), yaitu upaya peningkatan kemampuan beserta energi yang diperlukan;
2. Penekanan pada aspek pemerataan (*equity*) dalam rangka menghindari perpecahan didalam masyarakat yang dapat menghancurkan kapasitasnya;
3. Pemberian kekuasaan dan wewenang (*empowerment*) yang lebih besar kepada masyarakat, dengan maksud agar hasil pembangunan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, karena aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dapat meningkat. Disamping adanya wewenang untuk memberikan koreksi terhadap keputusan yang di ambil tentang lokasi *resource*;
4. Pembangunan mengandung pengertian kelangsungan pembangunan yang harus diperhatikan mengingat keterbasan sumber daya yang ada.

Pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Osborne dan Gaebler (2000 : 26) bahwa pengembangan mengandung arti suatu usaha yang ditandai oleh adanya suatu perubahan/peningkatan atas berkembangnya sesuatu. Jika

dikaitkan dengan fokus penelitian yang ditetapkan, maka pengembangan yang dimaksud lebih difokuskan pada suatu perubahan atas usaha yang dilakukan dalam menghasilkan sesuatu dari usaha yang ditekuninya. Untuk mencapai harapan tersebut tentunya harus dibarengi dengan semangat wira usaha yaitu memiliki semangat kerja atau memiliki jiwa interprenuer yang lebih difokuskan pada pencapaian hasil yang lebih baik.

Pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Emil Salim (1996 : 217), bahwa dalam menanggapi tantangan masa depan yang penuh gejolak perubahan yang cepat, maka dalam proses perlu memperhatikan lima aspek antara lain: (1) ketaatan pada prinsip moral dan agama, (2) sikap kesetiaan sosial dalam hubungannya antar manusia, (3) kreatifitas dan produktifitas, (4) pengembangan rasionalitas, dan (5) kemampuan menegakkan kemandirian.

Sedangkan Tadjuddin, (1993:5), memaknai tentang pengembangan lebih menekankan pada aspek manusia. Sebab manusia sebagai alat (*means*) maupun tujuan akhir dari setiap usaha, apalagi terkait dengan usaha untuk mengembangkan industri kecil dan menengah, justru dinilai sebagai determinan penting, karena kedudukannya bukan hanya sebagai faktor produksi yang statis sifatnya tetapi memiliki kemampuan yang dapat menggerakkan setiap usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Menurut Martoyo, (2000 : 68) terdapat 8 (delapan) aspek yang menjadi tujuan perlunya pengembangan, antara lain:

1. Produktifitas personil diorganisasi (*productivity*)
2. Kualitas produk organisasi (*quality*)

3. Perencanaan sumber daya manusia (*human resources planning*)
4. Semangat personil dan iklim organisasi (*morale*)
5. Meningkatkan kompensasi secara tidak langsung (*indirect compencation*)
6. Kesehatan dan keselamatan kerja (*health and savety*)
7. Pencegahan merosotnya kemampuan personil (*absolescence prevention*)
8. Pertumbuhan kemampuan personil (*personal growth*).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pengembangan adalah untuk merubah dan memperbaiki segala sesuatu kearah yang lebih baik atau lebih besar, pengembangan diarahkan untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih menguntungkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga memiliki nilai manfaat. Disisi lain, pengembangan diarahkan untuk tercapainya suatu perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu cukup alasan jika pengembangan menjadi fokus perhatian bagi usaha industri kecil dan menengah karena berimplikasi naiknya pertumbuhan dan ekonomi masyarakat.

3. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. (Thoha, 1986 : 178). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada dua unsur dalam pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses atau tujuan, dan kedua pembinaan menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu.

Memahami tentang pembinaan, dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu pembinaan kemanusiaan yakni pembinaan yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya baik jasmani maupun rohani. Sedangkan pembinaan keahlian dilakukan dengan memenuhi kebutuhan karyawan untuk bekerjasama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, dan dalam hal ini tujuan untuk mencapai produktivitas, efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Kedua kebutuhan apabila dipenuhi akan memberikan kontribusi yang berarti bagi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Thoah (1998 : 21) bahwa tujuan pembinaan karyawan adalah:

1. Ingin dicapainya penggunaan sumber tenaga kerja yang ada secara efektif. Ini maksudnya bahwa semua tenaga kerja yang terdapat didalam suatu usaha hendaknya bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Dari kepengurusan kepegawaian adalah (diharapkan) terciptanya hubungan kerja yang menarik di antara karyawan. Tujuan ini mengandung arti bahwa hubungan kerja yang terjalin diantara para karyawan pada lingkungan kerja.

Pembinaan karyawan lainnya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan karyawan agar dapat mempunyai sikap mental dan moral yang baik sehingga kecil kemungkinannya bertindak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Dengan demikian pembinaan karyawan itu penting dalam dunia usaha, sebab melalui pembinaan itulah dapat merubah sikap dan perilaku karyawan ke arah yang lebih baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan

beberapa peneliti memberikan pendapat yang senada tentang keluaran (*output*) dari pembinaan pegawai dan hanya sebagian kecil yang mengalami tidak ada perubahan. Esensi pembinaan karyawan selain dapat membentuk karakteristik dalam mengembangkan kemampuan individu ke arah hasil kerja yang lebih baik, juga dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam menunjang kelancaran bidang usaha.

Konsep pembinaan sebagaimana yang dikemukakan diatas pada dasarnya merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan ,yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering and sustainable*” (Chambers, 1997). Asumsi dasar yang dipergunakan bahwa setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan dirinya untuk mengaktualisasikan harapan-harapan yang diinginkan, termasuk harapan tercapainya bidang usaha yang menjadi pilihannya. Kalau selama ini yang bersangkutan tidak brdaya, karena belum dibina, sehingga tidak memiliki daya untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu pembinaan mempunyai urgensi untuk meningkatkan manusia agar memiliki daya atau kekuatan untuk mendukung pengembangan bidang usaha.

Dengan demikian melalui pembinaan itulah seseorang akan memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian untuk mendukung pengembangan usaha, disamping untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan keswadayaan dalam upaya mengatasi persoalan yang ada pada dirinya

sehingga mampu melepaskan diri dari ketergantungan pada birokrasi pemerintah.

Berkenaan dengan konsep pembinaan yang dikemukakan diatas bila dikaitkan dengan pembinaan pada bidang dunia usaha (industri kecil dan menengah) tentunya diarahkan untuk mengembangkan, kemandirian, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Priyorio dan Pranarka, dalam Sedarmayanti, 2000 : 273).

Pada dasarnya konsep pembinaan memiliki perspektif yang luas dan cukup banyak ditelaah dari berbagai sudut pandang. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya, hanya saja satu dan yang lainnya berbeda dan sangat dipengaruhi oleh "*interlingking factors*" antara lain pengetahuan, kemampuan status, harta, kedudukan, jenis kelamin. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai). Pola hubungan seperti inilah yang akan diperbaiki dalam proses pembinaan (Priyono, 1996 : 29) melihat proses pembinaan memiliki kecenderungan sebagai berikut :

1. Proses pembinaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuatan atau kemampuan kepada seseorang agar secara individual menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian, melalui organisasi dan biasa disebut kecenderungan primer.
2. Sebagai proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan, untuk menentukan apa yang

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog dan diskusi dalam organisasi / kelompok secara bersama. Disini terjadi proses konsistensi dengan cara menganalisis secara kritis situasi total mereka, termasuk melihat dimensi politiknya dan berusaha memperoleh kembali daya untuk mengubah situasi tersebut melalui aksi kolektif. Artinya, kaum masyarakat mulai belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya dan merancang solusi untuk memecahkan masalah tersebut dan biasa disebut kecenderungan sekunder.

Menurut Mubyarto (1994), menyatakan bahwa pada hakekatnya inti dari pembinaan berada pada manusia/rakyat. Faktor luar hanyalah berfungsi sebagai perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberi daya penguat, mengendalikan, mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Proses pembinaan ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu (1) inisiatif dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk rakyat, (2) Partisipatoris, dari pemerintah bersama masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat dan (3) Emansipatoris, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Priyono dan Pranarka, 1996 : 162).

Sedangkan menurut Sumodiningrat, (1999 : 272), ada 3 (tiga) orientasi dasar dalam pembinaan yaitu :1) pemihakan dan pemberdayaan masyarakat 2). Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. 3). Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Dari pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh Kartasasmita (1996 : 172), menyatakan bahwa upaya pembinaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga arah yaitu 1). Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), 2). Memperkuat potensi atau daya dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dan 3). Melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah, mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berbicara mengenai pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, karena cara ini dinilai sangat relevan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, dimana manusia itu belajar untuk belajar sendiri dan mendorong berkembangnya kemampuan dasar yang ada pada akhirnya menjadi sumber tenaga yang produktif. Dengan demikian cukup beralasan jika suatu usaha, baik usaha industri kecil maupun menengah didukung dengan sumber tenaga yang terampil. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Siswanto, 1998 : 139) bahwa salah satu jalan yang ditempuh oleh manajemen tenaga kerja adalah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, memberikan modal kerja, dan memberikan fasilitas kerja. Selain faktor tersebut yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pengembangan usaha industri kecil dan menengah adalah peran pemerintah dalam memberikan peluang usaha terhadap usaha industri kecil dan menengah.

C. Konsep Industri Kecil dan Menengah (IKM)

1. Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (“UU Perindustrian”) industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Pasal 1 angka 2 UU Perindustrian).

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 64/M-IND/PER/7/2016 Pasal 1 ayat (1) Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri Menengah adalah (a) mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah), atau (b) mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000. (lima belas milyar rupiah).

Menurut Biro Pusat Statistik (1998), mendefinisikan industri kecil dengan batasan jumlah karyawan atau tenaga kerja dalam mengklasifikasikan skala industri yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut:

1. Perusahaan atau industri rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang.

2. Perusahaan atau industri pengolahan termasuk jasa industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1 sampai 19 orang termasuk pengusaha, baik perusahaan atau usaha yang berbadan hukum atau tidak.
3. Perusahaan atau industri kecil jika memperkerjakan antara 5 sampai 19 orang.
4. Perusahaan atau industri sedang jika memperkerjakan antara 20 sampai 99 orang.
5. Perusahaan atau industri besar jika memperkerjakan antara 100 atau lebih.

Menurut Biro Pusat Statistik (2003), mendefinisikan industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha.

Menurut Bank Indonesia, industri kecil yakni industri yang aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995: a. (Pasal 1): ayat 1, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. b. (Pasal 5): (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-, (3) milik warga negara Indonesia, (4) berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dalam perkembangannya industri kecil membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, peningkatan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pembangunan industri kecil disebar luaskan ke seluruh wilayah melalui penempatan pusat pertumbuhan industri kecil, sentra industri, lingkungan industri.

Fungsi dari pusat-pusat pertumbuhan industri menurut Syahrudin (1989 : 45) adalah :

1. Sebagai pusat pembinaan dan penyeluruhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran
2. Sebagai pelengkap peralatan yang tidak dipergunakan bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk
3. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah terbatas pengusaha industri kecil.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa industri kecil mempunyai investasi modal yang relatif kecil dan penggunaan teknologi yang masih sederhana.

2. Karakteristik IKM di Indonesia

Menurut Djoko Sudantoko dan Panji Anoraga (2002) secara umum sektor industri kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standart. Kadangkala pembukuan tidak di-up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya;
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi;
- c. Modal terbatas;
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas;
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang;
- f. Kemampuan perusahaan dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas;
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dari pasra modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Industri kecil di Indonesia memiliki tantangan yang cukup berat yaitu persaingan dengan industri skala menengah dan besar. Namun, menurut Tambunan industri kecil terus dibina perkembangannya oleh pemerintah dengan berbagai alasan, antar lain:

- a. Proses produksinya sangat padat tenaga kerja, berarti perkembangannya akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan;
- b. Industri kecil lebih banyak terdapat di daerah pedesaan dan kegiatannya lebih berorientasi ke sektor pertanian, sehingga pengembangan industri kecil juga merupakan suatu landasan atau proses awal dari industrialisasi yang berorientasi agrobisnis di pedesaan;
- c. Umumnya industri kecil memakai teknologi sederhana;
- d. Sumber utama dana untuk pembayaran kegiatan industri kecil ini umumnya berasal dari uang si pemilik usaha itu sendiri;
- e. Industri kecil dipandang lebih bisa memenuhi kebutuhan penduduk dengan penghasilan rendah.

Selain itu industri kecil adalah industri yang mampu bertahan dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonomi yang terjadi. Industri kecil tidak mempunyai strategi formal ataupun strategi tertulis secara formal. Strategi yang dipakai muncul begitu saja dan sering direvisi sepanjang waktu dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang timbul pada saat tersebut. Industri kecil lebih mudah beradaptasi karena rentang kendali langsung dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Kemampuan beradaptasi atau penyesuaian inilah yang membuat industri kecil mampu bertahan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terjadi. (Sri Susilo, dkk, 2002).

Apabila dibandingkan dengan industri skala besar, sub sektor industri kecil memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan industri kecil adalah sebagai berikut: lebih padat karya, memiliki sejumlah fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang sulit dilakukan oleh industri sedang maupun industri besar,

lokasinya dapat mencapai daerah pedesaan sehingga sesuai dengan usaha pembangunan daerah, kurang terpengaruh oleh fluktuasi perekonomian.

Peran penting industri kecil selain merupakan wahan utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai penggerak roda ekonomi serta pelayanan masyarakat. Hal ini dimungkinkan mengingat karakteristik industri kecil yang tahan terhadap krisis ekonomi karena dijalankan dengan ketergantungan yang rendah terhadap pendanaan sektor moneter serta keberadaannya tersebar di seluruh pelosok negeri sehingga merupakan jalur distribusi yang efektif untuk menjangkau sebagian besar masyarakat (Djoko Sudantoko, Panji Anoraga, 2002).

3. Program Pembinaan IKM

Kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kecil sesungguhnya sudah ada sejak pemerintah Orde Baru, adapun langkah besar dan sedang, telah dan dilakukan dalam kebijakan yang mengatur para pengusaha industri kecil. Sebagaimana yang diamatkan dalam PJPM dikatakan bahwa :”kemampuan dan peranan usaha kecil terus dikembangkan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana usaha disertai dengan pengembangan iklim yang mendukung, termasuk penyederhanaan perizinan penyediaan kemudian dalam melakukan investasi, memperoleh permodalan dan kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, dan himbangan manajemen, serta alih teknologi.” (Irianto, 1999:12).

Dari komitmen pemerintah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah untuk kelangsungan hidup bagi pengusaha industri

kecil. Adapun tindakan yang dilakukan untuk diwujudkan harapan tersebut, dapat ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana usaha yang mendukung pengembangan sektor usaha kecil
3. Mengembangkan iklim yang mendukung tumbuhnya sektor usaha kecil, yang mencakup
4. Penyederhanaan perijinan;
5. Kemudahan dalam melakukan investasi;
6. Kemudahan memperoleh permodalan;
7. Kemudahan dalam kesempatan usaha;
8. Kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, bimbingan manajemen, dan
9. Kemudahan dalam teknologi. (Irianto, 1996: 32)

Untuk mewujudkan akses (kemudahan) bagi pengusaha industri kecil, pemerintah telah berupaya melancarkan program-program pelatihan, misalnya pelatihan motivasi (dengan metode Achievement Motivation Training atau AMT yang bertujuan untuk membangkitkan etos kerja), teknik produksi, administrasi usaha, promosi pemasaran atau tatacara berkoperasi dan bahkan pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada pengusaha industri kecil, misalnya melalui Undang-Undang Usaha Kecil (Raharjo, 1999:59).

Selanjutnya upaya pemerintah tersebut diwujudkan berupa penetapan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dalam Undang- Undang tersebut disebutkan antara lain tentang perlunya keberpihakan

pemerintah dalam pengembangan usaha kecil dalam berbagai bentuk seperti kemitraan, permodalan, pemasaran, teknologi, pencadangan usaha dan sebagainya. Sehingga Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi pengembangan usaha kecil yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk strategi dan langkah konkrit, yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah diantaranya pengembangan usaha industri kecil, pengentasan kemiskinan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program Takesra/ Kukesra, Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Ilmu Pengetahuan Daerah (IPTEKDA), dan lain sebagainya (Erwidodo, 1999 :4).

Pengembangan Usaha Pemaju –Keluarga (Proses, Kemas, dan Jual oleh Keluarga) untuk komoditas non pertanian, serta program yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Program Kelompok Belajar (KBU), Kredit Usaha Tani (KUT), dan lain sebagainya, dari keseluruhan kebijakan dan program tersebut bersifat memberdayakan (empowering) yang bersifat “keberpihakan” terhadap lapisan masyarakat kecil, terutama masyarakat di pedesaan.

Selanjutnya kebijakan dan program pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil yang diupayakan oleh pemerintah selama ini, menurut Kuncoro (1999 : 318) dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Aspek manajerial, yang meliputi peningkatann produktivitas / omzet / tingkat utilitasi/ tingkat hunian, kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Aspek permodalan, yang meliputi bantuan modal (penyisihan 1 – 5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha

kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPeDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/ Midi, KKU);

- c. Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu- hilir (forward linkage), keterkaitan hilir- hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak;
- d. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Usaha Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri), dan
- e. Pembinaan untuk bidang usaha bersama didaerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Pada era pembangunan seperti sekarang ini telah banyak upaya pembinaan dan pengembangan industri kecil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang concern dengan pengembangan usaha kecil. Hanya saja, upaya pembinaan usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Dalam konteks itulah menurut Assauri (dalam Kuncoro, 1995 : 318) untuk mengembangkan interorganizational process dalam pembinaan usaha kecil. Dalam praktek struktur jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan usaha kecil dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis PKPK (Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil), walaupun ide dasar pembentukan lembaga tersebut berasal dari Departemen Koperasi dan PPK yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan pengusaha kecil menjadi tangguh dan atau menjadi

pengusaha menengah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan koordinasi antar instansi.

Selanjutnya pada masa orde reformasi, dimana pemerintah berupaya lebih mengembangkan usaha industri kecil yang merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan. Secara politis pemerintah telah menciptakan landasan hukum bagi pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil, namun landasan hukum tersebut dirasakan belum memadai dan kemudian pemerintah membuat produk hukum seperti halnya Ketetapan MPR Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Tap MPR tersebut sebagaimana dikutip oleh Thoha (2000:163) merupakan salah satu pertimbangan pokok dari tuntutan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional, untuk itu diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Bahkan dalam pasal 3, 4 dan 5 dari Ketetapan MPR tersebut, dimana pasal 3 menyebutkan bahwa : “dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan asset dan pemusatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan keadilan dan pemerataan”.

Sedangkan di pasal 4 disebutkan bahwa “pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.” Selanjutnya dalam pasal 5 dinyatakan bahwa “usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama

ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.”

Sedangkan perangkat hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dengan disyahkan Undang-Undang tersebut, menurut Thoha (2000:264) mengemukakan tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kecil, Yaitu :

- a. Tersedianya perangkat hukum yang dapat dijadikan senjata untuk menghapuskan segala bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Diharapkan akan terwujud iklim usaha yang kondusif, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku sebagai usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, dan ;
- c. Fondasi hukum yang kuat telah diletakkan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, yang memungkinkan setiap warga Negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Senada dengan itu, menurut Tambunan (2000:181) kebijakan-kebijakan pemerintah konsisten terhadap pemberdayaan usaha industri kecil, antara lain :

1. Iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemeliharaan stabilitas ekonomi makro, penyederhanaan birokrasi, dan penyempurnaan peraturan/ perundang-undangan yang ada;
2. Perluasan kesempatan berusaha yang sama bagi semua golongan pengusaha;
3. Peraturan sistem persaingan yang sehat;
4. Peningkatan integrasi yang kuat, baik antar sesama usaha industri kecil di satu pihak maupun antara usaha industri kecil dan usaha menengah besar di pihak lain melalui bussiness alliance, seperti subcontracting;
5. Penguatan sisi permintaan, selain lewat butir-butir ; (1) dan (3), juga melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, tetapi juga dan bahkan lebih penting lagi (terutama untuk jangka panjang) lewat penguatan keterampilan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan usaha industri kecil.

D. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini,

fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah pembinaan terhadap industri kecil dan menengah. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet sebagai berikut :

1. **Edi Wibawa**, dalam Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan dengan judul Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi, menyebutkan tentang kelemahan atau halangan usaha kecil menengah dan koperasi, program yang dilakukan dalam pemberdayaan, usaha kecil dan menengah, serta kepihakan pemerintah dalam menentukan kebijakan.
2. **Jaka Sriyana**, tentang "Strategi Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) : studi kasus di kabupaten Bantul" menjelaskan berbagai permasalahan UMKM yang berada di kabupaten Bantul maka diperlukan strategi jitu guna mengatasi permasalahan yang ada. Dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Dinas yang terkait di lingkungan kabupaten dan provinsi. Selain itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UMKM.
3. Penelitian yang dilakukan **Saraswati (2008)** berjudul Pengembangan Industri Kecil Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Dari hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan melalui peningkatan keterampilan, pelatihan mengenai penggunaan fasilitas kerja dan pelatihan mengenai pemasaran hasil produksi ternyata mampu membawa perubahan bagi pelaku usaha industri kecil. Kurang optimalnya dalam pengembangan

industri kecil disebabkan oleh terbatasnya modal usaha dan kurang ditopang dengan sarana produksi, sehingga kurang mampu meningkatkan daya saing di segmen pasar. Disamping itu kurang didukung dengan sumber daya, terutama bahan baku yang ada di daerah tersebut semakin langka sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pasar.

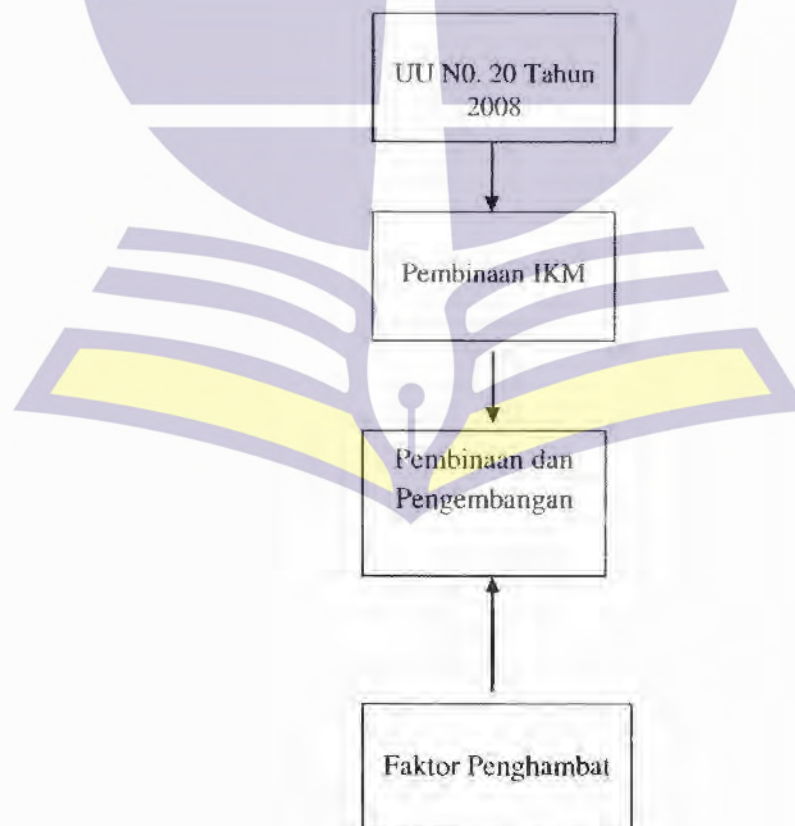
4. Penelitian yang dilakukan oleh **Novelistina, (2007)** berjudul Pengembangan Industri Kecil Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan Pengembangan industri kecil melalui pemberdayaan di Kecamatan Barong Tongkok ternyata secara implementif belum memenuhi harapan industri kecil. Program pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak ternyata telah memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan usaha kecil. Kurang optimalnya hasil yang dicapai dalam mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Barong Tongkok disebabkan oleh terbatasnya sarana produksi, modal usaha/kerja, dan penataan struktur serta sistem kelembagaan, terbatasnya tenaga terampil di bidang industri, kurang efektifnya lembaga pembina dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, kurang efektifnya dalam penyaluran dana bergulir.
5. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh **A. Harits Nu'man, (2005)** berjudul kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah sebagai upaya untuk menghadapi era perdagangan bebas. Dari hasil studi ini ditemukan bahwa peran sektor industri kecil dan menengah yang memiliki keunggulan komperatif, tidak disertai dengan penguasaan teknologi sebagai dasar

pengembangan wilayah berbasis teknologi. Permasalahan yang ada pada industri kecil dan menengah pada umumnya memiliki derajat kecanggihan setiap komponen teknologi (technoware, humanware, inforware, orgaware) yang relative rendah. Dengan demikian maka perspektif teknologi IKM memiliki kemampuan teknologi relative rendah.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penulis dalam melakukan penelitian berpedoman pada tinjauan teoritis yang digunakan. Berikut gambar kerangka pikir penelitian ini:

Gambar 2.3 : Alur Pikir Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.



F. Operasional Konsep

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka perlu dibuat konsep yang berkenaan dengan variable yang diteliti yaitu :

1. Pembinaan IKM

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu.

2. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.

Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri Menengah adalah (a) mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).

3. Faktor Penghambat

Faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau terhadap IKM dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksud adalah mendeskriptifkan fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Nawawi, (1998:132) bahwa penelitian deskriptif dirancang untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan analisis kualitatif dimaksudkan selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil, tetapi diharapkan juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang berkenaan dengan pembinaan usaha industri kecil dan menengah sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terjebak pada bidang / ruang yang sangat luas. Fokus penelitian ditentukan memiliki dua tujuan sebagai berikut : (1) Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, maka penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. (2) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang mengalir. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu akan direduksi. (Moleong, 2005:63).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menetapkan apa yang menjadi fokus penelitian, dan dengan menetapkan fokus yang tepat, maka arah

penelitian menjadi jelas dan informasi atau data yang diperoleh menjadi akurat. Fokus penelitian sangat penting sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan Industri kecil dan menengah, maka sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi :
 - a. Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan/SDM Melalui Pelatihan;
 - b. Pemberian bantuan permodalan dan sarana produksi;
 - Modal Usaha
 - Sarana Produksi
 - c. Memberikan fasilitasi pemasaran melalui promosi/pameran.
2. Faktor-faktor yang menghambat Pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.

C. Lokasi Pembinaan

Penelitian yang dilakukan penulis adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dan IKM yang menjadi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai objek penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah lembaga Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan terhadap pembinaan Industri Kecil dan Menengah.

2. Prospek usaha Industri Kecil dan Menengah di daerah tersebut, ada kecenderungan bisa lebih baik, maka perlu pembinaan sehingga mampu bersaing di sekmen pasar.
3. Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk berkembangnya Industri Kecil dan Menengah, tetapi belum dibina secara optimal, sehingga hasil produksi yang dicapai kurang optimal.
4. Kemudahan untuk mendapatkan data, karena peneliti merupakan pegawai di lingkungan kerja di lembaga tersebut.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif kedudukan peneliti sekaligus bertindak sebagai instrumen penelitian yaitu perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya dapat menyimpulkan mengenai hasil yang di capai Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong 2005:121-125) mengatakan bahwa manusia sebagai instrumen penelitian mencakup tiga hal, yaitu ciri-ciri umum, kualitas yang diharapkan, dan kemungkinan peningkatan manusia sebagai instrumen penelitian (key instrumen). Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai instrumen pelengkap oleh peneliti adalah alat tulis yang akan digunakan untuk pencatatan, wawancara dengan informan dan key informan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan

fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling* (Moleong, 2004 : 65). Adapun cirinya dari mana atau dari siapa informasi mulai diambil tidak menjadi soal, akan tetapi bila telah berjalan proses tersebut berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan proses akan berlangsung terus. Proses berakhir apabila terjadi pengulangan informasi serta pertimbangan kecukupan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Peristiwa ini biasa disebut dengan data jenuh.

Penentuan informan (*key person*) dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (Sutopo, 2006). Teknik cuplikan untuk informan ini digunakan pada pengumpulan data kualitatif yang lebih bersifat *purposive sampling*. Dalam hal ini peneliti akan memilih yang dipandang memiliki informasi memadai, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti memperoleh data.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Industri dan TTG, Kepala Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Kepala Seksi Bina Industri Kecil dan TTG, Kepala Seksi Bina Industri Logam, Kepala Seksi Bina UMKM dan Permodalan, informan ini dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti karena alasan bahwa informan tersebut diatas adalah mereka yang bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, memiliki pengalaman dalam membina IKM, mengetahui permasalahan karena sebagai penanggung jawab program pembinaan terhadap IKM. Sedangkan 6 (enam) orang pelaku

usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dipilih karena mengetahui permasalahan sebagai objek binaan dan subyek pelaku kegiatan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Moleong (2005:37) dalam proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Memasuki Penelitian (Greeting in):

Dalam tahap ini, peneliti memasuki lokasi penelitian untuk menemui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau sebagai langkah awal, kemudian dilanjutkan ke Kepala Bidang Industri dan TTG yang membidangi dengan menyampaikan ijin formal / permohonan yang dibuat oleh Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Negara, sebagai bukti menemui informan kunci (Key informan) untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Langkah selanjutnya peneliti beradaptasi dan belajar dengan nara sumber / informan, dengan maksud untuk mendapatkan informasi data sesuai yang diperlukan peneliti.

2. Berada di Lokasi Penelitian (getting a long):

Pada tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang valid/akurat.

3. Mengumpulkan Data (longing data):

Ada 3 macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan rinci. Observasi yang dilakukan peneliti adalah langsung mengamati dan atau ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh narasumber. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Observasi dilakukan terhadap kegiatan usaha IKM dan Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Malinau terhadap IKM.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang bisa menjawab pertanyaan peneliti secara tuntas, sehingga diharapkan apa yang dinyatakan subyek atau narasumber kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya serta interpretasi narasumber tentang pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti, sehingga permasalahan dalam penelitian ini bisa terjawab secara rinci dan bisa dipertanggung jawabkan. Wawancara dilakukan terhadap para pelaku IKM di Kabupaten Malinau untuk mendapatkan data yang mendukung mengenai sejauh mana manfaat pelatihan, pameran, bantuan modal dan peralatan kerja bagi pengembangan usaha mereka. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak terkait yang selama ini melaksanakan program pembinaan terhadap IKM yaitu pegawai dari

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan buku catatan dan kamera.

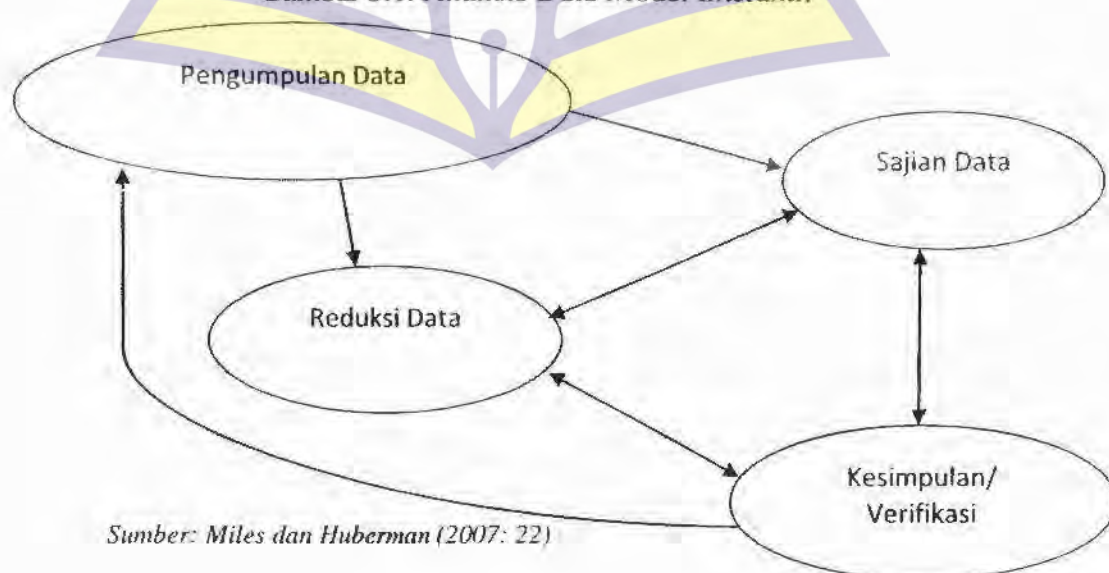
c. Dokumen

Data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa data arsip, LAKIP, RPJMD, Malinau Dalam Angka 2016, Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau yang digunakan sebagai data pendukung

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh secara langsung berbentuk kalimat, kata-kata dijabarkan dalam suatu analisis yang lebih mendalam. Analisis data yang digunakan sesuai dengan tahapan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007: 22) seperti terlihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (2007: 22)

Adapun penjelasan dari gambar analisis data model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data merupakan tindakan awal untuk memastikan mengenai data-data apa saja yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahasan penelitian, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.
2. Reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
3. Penyajian data, diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Alasan mendasar dilakukan tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan bentuk (Gestalt) yang disederhanakan dan konfigurasi yang mudah dipahami. Sehingga semua data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk yang padu untuk memahami fenomena yang ada dibandingkan dengan teori dan yang perlu dipahami dalam langkah ini juga merupakan kegiatan reduksi data.
4. Menarik kesimpulan / verifikasi, adalah proses mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 131 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau. Terakhir susunan organisasi tersebut diperbaharui dengan SK Bupati No. 43 tahun 2016 dan nama dinas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.

1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1) Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau harus mempunyai Visi ke depan tentang arah dan sasaran yang akan dicapai agar tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang stabil, aman dan kondusif serta berdaya saing tinggi.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah kedua (RPJMD) ke 3 tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA), maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah :

“MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PASAR, KOPERASI, DAN UMKM YANG MAMPU MENJADI PENGGERAK PEREKONOMIAN DAERAH MENUJU MASYARAKAT DESA YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)”.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pelaku Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM;
2. Mengembangkan Sistem Perdagangan yang Efektif, Efisien dan Berdaya Saing;

3. Mengembangkan Industri yang Bertumpu pada Potensi Daerah yang Berkelanjutan;
4. Memberdayakan Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
5. Memberikan Pelayanan Kepada Publik Secara Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan didukung Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas serta Sarana dan Prasarana yang Memadai;
6. Menata Kelola dan meningkatkan sistem penanganan pasar dapat meningkatkan Kenyamanan pelaku pasar maupun konsumen di Pasar;
7. Menertibkan Pedagang Pasar;
8. Menumbuh Kembangkan Partisipasi Kepedulian Kebersihan dan Keamanan Pasar.

2. Keadaan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tentu membutuhkan sumber daya sebagai motor penggeraknya. SDM aparatur yang dimiliki oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau hingga akhir tahun 2016 sebanyak 43 orang PNS Terdiri dari : 1 orang Pejabat eselon II b, 1 orang pejabat eselon IIIa, 4 orang pejabat eselon IIIb, 15 orang pejabat eselon IVa, dan 14 orang staf dibantu dengan 8 orang PTT. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Daftar Sumber Daya Aparatur PNS dan PTT
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau Tahun 2016

No	Nama	Pangkat/Gol/ Ruang	Pend	Jabatan / Eselon
1.	Drs. Emang Mering, M.Si	Pembina Utama Muda/ Ivc	S2	Kepala Dinas/IIB
2.	Aji Iskandar A, SE.	Pembina IV/a	S1	Sekretaris/III A
3.	Radianto, SE	Pembina, IV/a	S1	Kabid Industri & TTG /III B
4.	Erly Sumiati, SE, M.Si	Penata Tk I, III/d	S2	Kabid Perdagangan /III B
5.	Johan, S.Pd, MM	Pembina, IV/a	S2	Kabid Koperasi & UMKM /III B
6.	Ezra Stevanus, S.Hut., M.Si.	Pembina, IV/a	S1	Kabid Penataan Pasar/IIIB
7.	Markus Lawing, S.Pd	Penata Tk I/ IIIId	S1	Kasubbag Sungram /IVA
8.	Aplina Agusthina, SE	Penata Tk I/ IIIId	S1	Kasubbag Keuangan /IVA
9.	Juraidah, SE.	Penata TKI/IIIId	S1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / IV A
10.	Ande Setiawan, SE, M.Si	Penata/IIIc	S2	Kasi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi /IV A
11.	Djuraidah T	Penata Tk I/ IIIId	SMA	Kasi Bina Permodalan dan UMKM/IV A
12.	Novelson, SE	Penata, III/c	S1	Kasi Bina Usaha UMKM/ IV A
13.	Ronald Pirade, S. Hut	Penata, III/c	S1	Kasi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
14.	Joko Agus Santoso, ST, M.Si	Penata Tk I/IIIId	S2	Kasi Teknologi Tepat Guna (TTG) / IV A
15.	Bulan Asa, SE	Penata Tk I/IIIId	S1	Kasi Logam, Metal dan Aneka Industri / IV A
16.	Syahrani, SE. M.Si.	Penata Tk I/IIIId	S2	Kasi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
17.	Ismail, SH	Penata Tk I/IIIId	S1	Kasi Perlindungan Konsumen
18.	Rijani Abdulracman, SE.	Penata/IIIc	S1	Kasi Keamanan dan Penertiban Pasar
19.	Yohanes Along, A.Md	Penata Muda Tk I/IIIb	D3	Kasi Penataan Pasar
20.	Golkar H. Simamora, SE, M.Ap	Penata/IIIc	S2	Kasi Perdagangan Luar Negeri
21.	Roy Alson, SE	Penata Muda Tk I/IIIb	S1	Kasi Bina Perdagangan Dalam Negeri / IV A
22.	Gangsar Arianto, ST	Penata Muda Tk I/IIIb	S1	Staf
23.	Risma Novianti, SE	Penata Muda Tk I/IIIb	S1	Staf
24.	Abraham Lawai, SE	Penata Muda Tk I/IIIb	S1	Staf
25.	Isnaniah, A.Md	Penata Muda Tk I/IIIb	D3	Staf
26.	Sorlena, SE	Penata Muda, III/a	S1	Staf
27.	Ariyati Ningsih, A.Md	Penata Muda, III/a	D3	Staf
28.	Joni Khanady	Pengatur Tk I/IId	SMA	Staf
29.	Cristian Andy, A.Md	Pengatur/IIc	D3	Staf

30.	Susilawati	Pengatur, II/c	D3	Staf
31.	Betty Astuti	Pengatur Muda Tk I, II/b	SMA	Staf
32.	Efendi Irawan	Pengatur Muda Tk I, II/b	SMA	Staf
33.	Supian	Pengatur Muda Tk I, II/b	SMA	Staf
34.	Harnawan	Pengatur Muda Tk I, II/b	SMA	Staf
35.	Heri Kurdianto	Pengatur Muda Tk I, II/b	SMA	Staf
36.	Sapli, SE	PTT Dinas	S1	Staf
37.	Ummi Kalsum, ST	PTT Dinas	S1	Staf
38.	Andini Perdanasari, S.S	PTT Dinas	S1	Staf
39.	Patricia Isabella, S.Th	PTT Dinas	S1	Staf
40.	Jemmi, A.Md	PTT Dinas	D3	Staf
41.	Imanuel Hadi, A.Md	PTT Dinas	D3	Staf
42.	Rena Cicilia, A.Md	PTT Dinas	D3	Staf
43.	Andi Klas	PTT Dinas	SMA	Staf

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau Tahun 2016

3. Deskripsi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 131 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau. Terakhir susunan organisasi tersebut diperbaharui dengan SK Bupati No. 43 Tahun 2016, adapun Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah membina, menumbuhkembangkan dan memajukan usaha masyarakat dibidang Perindustri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dan peraturan daerah bidang Perindustrian, perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau sebagai implementasi dari UU dan Peraturan Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada;
2. Melaksanakan program dan kegiatan di sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, dan UMKM sesuai dengan skala prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pola hidup masyarakat;
3. Mengadakan koordinasi dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan di sektor Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat;
4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha dinas dalam rangka mendukung semua program dan kegiatan yang telah disusun dan dianggarkan oleh daerah untuk masing-masing SKPD pada setiap tahun anggaran.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Malinau :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Industri dan TTG
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka Industri (ILMEA)
 - b. Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
 - c. Seksi Bina Industri Kecil dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
4. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen
5. Bidang Pengelolaan Pasar
 - a. Seksi Penataan Pasar
 - b. Seksi Keamanan dan Penertiban Pasar
 - c. Kepala Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
6. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
 - a. Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha koperasi
 - b. Seksi Bina Kelembagaan dan UMKM
 - c. Seksi Bina Permodalan dan UMKM
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Fungsional

4. Data Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2016

Industri kecil dan menengah di Kab. Malinau masih bersifat padat karya dan tergantung dengan pesanan serta kapasitas produksinya masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Dengan iklim usaha yang

fluktuatif, maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Berdasarkan hasil pendataan industri kecil dan menengah Kabupaten Malinau 2016, menunjukkan bahwa jumlah unit usaha IKM sebanyak 663 unit usaha, jumlah tenaga kerja sebanyak 1.442, investasi sebanyak Rp. 28.344.590.000,-. Rincian data sebagai berikut :

Tabel. 4.2.
Jumlah Investasi Sektor Industri Tahun 2016

No	Skala Usaha	Jumlah Usaha	Investasi (Rp)
1	Kecil	662	26.844.590.000,-
2	Menengah	1	1.500.000.000,-
Jumlah			28.344.590.000,-

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM tahun 2016

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-Undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan UU tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua stakeholder untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang UMKM terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat. Di antara pasal-pasal tersebut terdapat lima pasal yang mendelegasikan secara tegas pengaturan beberapa substansi secara lebih detail dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, pasal 12 ayat (2), tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal

16 ayat (3) tentang Tata Cara Pengembangan UMKM. Ketiga, pasal 37, tentang Kemitraan. Keempat, pasal 38 ayat (3), tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima, pasal 39 ayat (3), tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan, bahwa penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau. Sesuai jenis penelitian yang dilakukan bahwa penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu mengkaji lebih mendalam tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada Pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.

Fokus penelitian yang ditetapkan tentang Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau meliputi: Meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan / Sumber Daya Manusia (SDM), memberikan bantuan Permodalan dan Sarana Produksi, memberikan fasilitasi pemasaran. Dari hasil pengolahan data, selanjutnya dapat dideskripsikan sesuai substansi permasalahan seperti yang uraian berikut:

1. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

Data mengenai pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dirincikan dalam tiga indikator, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan pada bab II, yaitu meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan/sumber daya

manusia, memberikan bantuan permodalan dan sarana produksi, memberikan fasilitasi pemasaran.

Konsep pembinaan industri kecil dan menengah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perubahan pelaku IKM dari kondisi masa kini menuju kondisi masa depan melalui identifikasi sasaran pembinaan. Dengan demikian diharapkan pembinaan terhadap IKM Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan pembinaan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai program kegiatan tahunan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Program Kegiatan Pembinaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	2012	
		1. Optimalisasi Operasional Gedung Industri Rotan.	100.000.000,-
		2. Optimalisasi Operasional Gedung Penggilingan Padi.	150.000.000,-
		3. Lomba Desaian Kerajinan Cenderamata.	100.000.000,-
		2013	
		1. Optimalisasi Showroom Daya Maju Sejahtera.	100.000.000,-
		2. Pembinaan Home Industri.	700.000.000,-
		3. Hak Paten Motif Kerajinan Long Sule.	200.000.000,-
		4. Pelatihan Membuat Khas Malinau.	950.000.000,-
		2014	
		1. Optimalisasi Operasional Gedung BLKI/Rotan.	150.000.000,-
		2. Optimalisasi Operasional Gedung Penggilingan Padi.	100.000.000,-
		3. Sertifikasi Hak Cipta Batik Khas Malinau.	100.000.000,-
		4. Pendataan dan Pembinaan IKM.	200.000.000,-
5. Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan dan Ukiran.	100.000.000,-		
6. Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	50.000.000,-		
2015			
1. Pendataan Industri di 8 Kecamatan.	229.660.000,-		
2. Operasional Showroom Daya Maju Sejahtera	38.880.000,-		

		2016 1. Pembinaan dan Monitoring IKM di Kab. Malinau 2. Fasilitasi Promosi Batik Malinau	100.000.000,- 150.000.000,-
2.	Program Pemberdayaan UMKM	2012 1. Bimtek Teknis Kelembagaan UMKM 2013 1. Pembinaan Kelompok TTG. 2. Pelatihan Juice Keladi. 3. Pelatihan dan Pengadaan Alat Pandai Besi. 4. Peningkatan Pengolahan Makanan Tradisional. 5. Pelatihan Manajemen Kewirausahaan. 6. Pengadaan dan Pengadaan Alat Perbengkelan Elektronik dan Las. 2014 1. Dilkat Manajemen Kewirausahaan Bagi UMKM. 2. Pembinaan dan Monitoring UMKM Bagi Penerima Bantuan Modal. 2015 1. Monitoring Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bantuan Modal. 2016 1. Monitoring Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bantuan Modal	150.000.000,- 50.000.000,- 50.000.000,- 250.000.000,- 500.000.000,- 200.000.000,- 150.000.000,- 200.000.000,- 200.000.000,- 225.765.000,- 100.000.000,-
3.	Program Pengembangan Teknologi Industri	2013 1. Pengadaan Mesin Pengolahan Dodol dan Keripik. 2. Pengadaan Alat Kemasan Produk. 3. Pengadaan Alat Penggilingan Tepung Ubi dan Keladi	80.000.000,- 90.000.000,- 91.150.000,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	2012 1. Pengadaan Alat Untuk Home Industri/IKM 2. Pelatihan dan Pengadaan Alat Pemintal Serat Nanas. 3. Penataan Halaman Jalan Masuk Gedung Industri Kerajinan rotan. 4. Pelatihan dan Pembinaan Home Industri. 5. Pengolahan Makanan Tradisional 2013 1. Pengadaan Alat Kerajinan Tangan 2. Pengadaan Mesin Pemipil dan Penggiling Jagung. 3. Pengadaan Alat dan Pelatihan Pertukangan dan Ukiran. 4. Pengadaan Alat Pengupas Kulit Kopi. 5. Pengadaan Alat Pembuatan Perahu. 2015 1. Pelatihan Membuat Khas Malinau	1.000.000.000,- 187.290.000,- 1.144.300.000,- 1.500.000.000,- 1.000.000.000,- 250.000.000,- 90.000.000,- 200.000.000,- 300.000.000,- 75.000.000,- 500.000.000,-
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2012 1. Optimalisasi Operasional Gedung Penggilingan Padi. 2. Optimalisasi Operasional Gedung Rotan. 2015 1. Pembangunan Lanscape Gedung Rotan	500.000.000,- 100.000.000,- 500.000.000,-

6.	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Promosi Produk Unggulan	2012 1. Pameran dan Promosi Produk Unggulan Kab. Malinau.	500.000.000,-
7.	Bantuan Modal Bagi UMKM	2013 Bantuan Modal Bagi UMKM 2014 Bantuan Modal Bagi UMKM 2015 Bantuan Modal Bagi UMKM	2.460.000.000,- 1.500.000.000,- 500.000.000,-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau

Dari Tabel 4.3. diatas bahwa berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil temuan mengenai sub focus penelitian yang ditetapkan, maka secara substantif dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan/SDM melalui Pelatihan

Kemampuan ilmu pengetahuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan suatu organisasi atau lembaga usaha sangat menentukan dan memiliki peranan yang sangat penting terhadap pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM senantiasa mendapatkan prioritas yang utama. Sehubungan dengan itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam meningkatkan kemampuan SDM pelaku IKM, melaksanakan kegiatan pelatihan.

Beberapa kegiatan pelatihan yang pernah dilaksakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah :

1. Pelatihan Membatik

Pelatihan batik merupakan salah satu bentuk pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau terhadap pelaku IKM batik. Pelatihan batik dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pelatihan pertama dilaksanakan pada tahun 2013 dengan peserta sebanyak 25 orang, pelatihan kedua dilaksanakan pada 2015 dengan peserta sebanyak 20 orang. Kedua pelatihan ini dilaksanakan di tempat yang sama yaitu di ruang aula gedung PKK Kab. Malinau. Narasumber yang memberikan materi di pelatihan itu adalah Instruktur dari Balai Batik Yogyakarta. Adapun materi yang diberikan pada pelatihan pertama adalah teori dasar batik, proses pembuatan batik dan materi pelatihan kedua adalah motif batik (desain batik).

2. Pelatihan Anyaman Rotan

Pelatihan Anyaman Rotan dilaksanakan di BLKI Kuala Lapang Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dengan Balai Kerajinan Rotan dari Cirebon. Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Drs. H.M. Maksun, M.AP dan dihadiri oleh Para pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Disperindag Malinau. Pendamping dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dan seluruh peserta pelatihan. Pelatihan diikuti sebanyak 20 (dua puluh) perajin. Kegiatan ini merupakan program peningkatan keterampilan anyaman bagi para perajin rotan yang ada di Kabupaten Malinau. Kegiatan Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan dilaksanakan selama 5 hari dengan 34 JPL.

Isi materi pelatihan adalah Pengenalan Bahan dan Alat Rotan, dasar tentang kerajinan rotan, Praktek Membuat Kerajinan Rotan.

Dalam sambutannya Kepala Disperindag Kabupaten Malinau mengatakan, kegiatan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan hasil produksi industri kecil menengah (IKM).

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Kabupaten Malinau pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Kegiatan Pelatihan Disperindag 2012-2016

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	Pelatihan Membatik Khas Malinau (2015)	20 Orang	20 Hari	Malinau
2	Pelatihan Membatik Khas Malinau (2013)	25 Orang	30 Hari	Malinau
3	Pelatihan dan Pembinaan Home Industri	30 orang	5 hari	Malinau
4	Pelatihan Pemintal Serat Nanas	20 Orang	5 hari	Kayan Selatan
5	Pengolahan Makanan Tradisional	84 Orang	5 hari	Malinau
6	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	40 Orang	4 hari	Malinau
7	Pelatihan Pandai Besi	14 Orang	5 hari	Malinau
8	Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan dan Ukiran	6 Orang	5 hari	Malinau
9	Pelatihan Pembuatan Kue Singkong dan Pisang	30 Orang	2 Hari	Malinau
11	Diklat Manajemen Kewirausahaan KUKM	40 Orang	5 Hari	Malinau
12	Pelatihan Membuat Kue dari Keladi dan Ubi Kayu	20 Orang	5 Hari	Malinau Long Kebinu
13	Pelatihan Pertukangan dan Ukiran	20 orang	5 Hari	Malinau
14	Pelatihan Perbengkelan dan Las	6 orang	5 Hari	Malinau
15	Pelatihan Pembuatan Juice Keladi	5 Orang	2 Hari	Long Kebinu

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM tahun 2016

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau sering dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM, namun dari segi aplikasi dan penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh peserta hanya sebagian kecil saja yang dapat diterapkan dalam menjalankan usahanya karena berbagai faktor, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pelaku IKM Batik Khas Malinau mengatakan bahwa :

“...pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Kab. Malinau yang pernah saya ikuti adalah pelatihan membuat batik sebanyak 2 kali, dari pelatihan tersebutlah saya belajar membuat batik sehingga bisa membuat usaha batik. Namun dari segi penyerapan ilmu yang didapatkan pada saat pelatihan kurang maksimal, disebabkan karena peserta terlalu banyak.” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

Pendapat lain juga disampaikan oleh satu IKM anyaman rotan dalam pendapatnya mengenai pelatihan yang pernah diikuti mengatakan :

“...saya pernah mengikuti pelatihan anyaman rotan di BLKI Kuala Lapang selama 5 (lima) hari yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag, instruktornya dari Cirebon. Penerapan hasil pelatihan dalam menjalankan usaha sudah mulai saya terapkan sedikit demi sedikit namun belum maksimal. karna usaha saya masih skala kecil karena ada yang pesan baru buat kerajinan.” (Hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

Pendapat lain juga disampaikan oleh IKM batik dalam pendapatnya mengenai pelatihan yang pernah diikuti mengatakan bahwa:

“...Salah satu pelatihan yang pernah saya ikuti dari Dinas Perindagkop adalah pelatihan batik, namun hasil dari pelatihan tersebut belum bisa saya terapkan karena keterbatasan modal dan waktu dan bahan-bahan untuk membuat batik tidak tersedia di Malinau dan harus dibeli dari Jawa dengan harga mahal.” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

Pendapat lain juga disampaikan oleh salah satu IKM kue tradisional dalam pendapatnya mengenai pelatihan yang pernah diikuti mengatakan bahwa :

“...saya pernah mengikuti pelatihan pembuatan kue tradisional selama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag, dari pelatihan tersebut saya dapat membuat kue dalam menjalankan usaha kue tradisional sudah digeluti, namun produksi yang dihasilkan belum maksimal karena dari peralatan produksi yang belum lengkap.” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

Dari beberapa pendapat dari pelaku IKM diatas, dipertegas lagi oleh Kepala Bidang Industri dan TTG sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut :

“...Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau senantiasa memberikan pelatihan kepada pelaku IKM sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan serta kompetensi dari pelaku IKM. Namun dari hasil evaluasi pasca pelatihan penerapannya masih belum maksimal. Beberapa faktor yang menjadi penghambat atas penerapan ilmu pasca pelatihan adalah :

- Tingkatkan pendidikan pelaku IKM yang rendah, sehingga agak kesulitan untuk menyerap materi pelatihan.
- Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan jenis usahanya, sehingga ilmu yang didapatkan tidak dapat diterapkan lebih lanjut.
- Kualitas produk yang dihasilkan pasca pelatihan belum maksimal, sehingga kurang diminati konsumen yang pada akhirnya produksi macet. (Hasil wawancara. 2 Oktober 2017).

b. Memberikan Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi

1. Bantuan Permodalan

Modal usaha adalah merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan satu usaha, baik ketika akan memulai suatu usaha maupun dalam pengembangannya harus butuh modal. Kurangnya permodalan merupakan salah satu permasalahan bagi IKM. Hal ini terjadi karena pada umumnya industri kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan

pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Dalam rangka pemberdayaan terhadap UMKM, maka pemerintah Kabupaten Malinau telah pemberian bantuan permodalan berupa dana bergulir.

Penyaluran pinjaman modal bergulir adalah suatu fasilitasi secara simultan sebagai investasi yang disediakan untuk membantu usaha industri kecil sebagai modal kerja atau untuk membiayai usaha produktif. Program ini diarahkan untuk menumbuhkembangkan sektor ekonomi kerakyatan (industri kecil), sehingga ke depan usaha tersebut dapat berkembang atau mengalami kemajuan yang berarti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara implementatif mengenai panyuluran pinjaman modal usaha diatur berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Dana Perkuatan Modal UMKM dan Keputusan Bupati Nomor : 518.3/K.201/2015 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemberian Dana Penguatan Modal UMKM. Pemberian suntikan modal usaha oleh Pemerintah Kab. Malinau merupakan tindakan yang tepat mengingat Kab. Malinau luas wilayah yang besar sehingga memiliki potensi bahan baku yang dapat diolah dan memiliki nilai ekonomis untuk mendukung pengembangan usaha, karena terbatasnya modal usaha, maka daerah yang potensial dan sangat menjanjikan dan memiliki nilai ekonomis tersebut selama ini kurang

banyak memberi kontribusi yang berarti untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh pelaku usaha industri kecil mengatakan bahwa

“... usaha yang saya dilakukan selama ini, memang telah mengalami perubahan, tetapi perubahannya relatif kecil, bahkan hanya mampu bertahan untuk kelangsungan usaha, karena terbatasnya modal usaha yang saya miliki, sehingga saya tidak dapat berbuat banyak untuk berkembang sesuai yang saya harapkan. Terkecuali saya mendapatkan suntikan modal usaha, dan saya yakin akan lebih berkembang” (hasil wawancara, 3 Oktober 2014)

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kurang berkembangnya para pelaku usaha industri kecil di Kabupaten Malinau, dikarenakan oleh terbatasnya modal kerja, sehingga kurang mampu bersaing dengan pelaku usaha industri kecil yang memang memiliki modal yang cukup. Terutama bagi para pelaku usaha yang mendapatkan suntikan modal usaha, mampu untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian bagi para pelaku usaha industri kecil yang belum mendapatkan suntikan modal usaha sepertinya mengalami kendala bahkan tidak dapat berbuat banyak dalam mengembangkan usahanya.

Meski demikian secara aplikatif penyaluran modal usaha melalui kredit bergulir menunjukkan kontribusi yang berarti untuk menunjang pengembangan usaha industri kecil. Meskipun nilai pinjaman kredit bergulir relative kecil tetapi mempunyai nilai manfaat cukup berarti untuk menggerakkan hasil produksi. Berdasarkan kebijakan yang ditentukan untuk pelaku usaha kecil sebesar Rp. 5.000.000,- dan nilai terbesar hingga mencapai Rp. 50.000.000,- Adapun besar kecilnya pinjaman yang diberikan sangat tergantung pada hasil survey. Meskipun

besarnya bantuan yang digulirkan ke para pelaku usaha kecil bervariasi, tetapi ditinjau dari segi nilai manfaat sangat berarti untuk menunjang kelancaran / berkembangnya usaha yang dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pelaku usaha industri kecil dibidang perbengkelan yang memperoleh bantuan modal usaha, mengatakan bahwa :

“... menurut saya, mengenai bantuan modal usaha melalui pinjaman modal kredit bergulir sangat berarti untuk menunjang usaha saya dan hingga kini telah mengalami kemajuan yang berarti. Dengan adanya bantuan tersebut, saya dapat menambah komponen (stock) lebih beragam, sehingga kerjaan saya lebih lancar. Ini tidak terlepas dari bantuan melalui kredit bergulir yang disalurkan Disperindag. Menurut saya, bantuan modal usaha memang besar kontribusinya untuk menunjang kelancaran usaha yang saya kembangkan selama ini.” (hasil wawancara, 3 Oktober 2017).

Pendapat senada juga disampaikan oleh salah satu pelaku usaha batik khas malinau dalam pendapatnya mengenai bantuan modal usaha melalui pinjaman modal kredit bergulir mengatakan bahwa :

“...menurut saya mengenai penyaluran bantuan modal bergulir sangat tepat untuk para pelaku usaha industri kecil. Mengingat selama ini terbentur oleh modal, dan sebagian besar pelaku usaha industri kecil selalu dihadapkan oleh modal yang terbatas. Maka dari itu dengan diberikan bantuan modal usaha, menurut saya para pelaku usaha industri merasa terbantu. Seperti yang saya alami sendiri, dengan berkembangnya usaha ini berkat bantuan melalui kredit bergulir untuk membeli kain, pewarna dan lilin.” (hasil wawancara, 3 Oktober 2017)

Berdasarkan pendapat informan diatas menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan melalui bantuan modal usaha kredit bergulir di Kab. Malinau besar kontribusinya untuk menunjang pengembangan usaha industri kecil. Dengan adanya bantuan modal usaha melalui kredit bergulir, para pelaku usaha industri kecil merasa terbantu, karena

bantuan tersebut dapat menambah investasi atau menambah modal usaha sehingga sangat mendukung operasionalisasi dalam proses produksi.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pengembangan usaha industri kecil yang dilakukan melalui pemberian pinjaman kredit bergulir merupakan kebijakan yang tepat, dan diberikan disaat para pelaku usaha industri kecil mengalami kesulitan modal usaha, maka dengan diberikan bantuan modal usaha melalui pinjaman kredit bergulir, dapat menggerakkan usahanya lebih leluasa.

Tabel 4.5.
Bantuan Modal Usaha Disperindag 2012-2016

No	Bantuan Modal Tahun	Nilai	Jumlah Penerima
1	Bantuan Modal Tahun 2013	2.460.000.000,-	142 UMKM
2	Bantuan Modal Tahun 2014	1.500.000.000,-	138 UMKM
3	Bantuan Modal Tahun 2015	500.000.000,-	48 UMKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bantuan modal yang disalurkan setiap tahun mengalami penurunan baik dari jumlah UMKM penerima maupun nilai yang disalurkan hal ini dikarenakan pelaku UMKM yang sebelumnya mendapatkan bantuan modal usaha belum mengembalikan modal yang dipinjamnya.

Pendapat informan dari IKM meubel dalam pendapatnya mengenai bantuan permodalan mengatakan bahwa :

“... Saya pernah mendapatkan bantuan permodalan dari Disperindag sejumlah Rp. 5.000.000, tanggapan saya bantuan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha kami. Sampai saat ini masih ada sisa pinjaman yang belum saya lunasi sebanyak Rp. 2.000.000. Alasan terjadi penunggakan bukan karena tidak mampu membayar

tetapi memang belum ada waktu untuk melunasi.” (hasil wawancara, 3 Oktober 2017).

Dari pendapat beberapa informan diatas, kemudian dipertegas oleh Kasi Bina Permodalan dan UMKM mengatakan bahwa :

“ ...bantuan modal usaha yang kami lakukan melalui pinjaman kredit bergulir merupakan langka yang tepat, mengingat banyaknya keluhan para pelaku industri kecil, selalu terbentur dengan modal usaha yang terbatas, sehingga sulit untuk berkembang. Oleh karena itu dengan adanya bantuan modal usaha melalui kredit bergulir, para pelaku usaha industri kecil dan menengah merasa terbantu. Untuk penyalurannya diutamakan bagi para pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan, terutama mengenai usaha yang dijalankan harus betul-betul serius karena sebelumnya pelaku UMKM disurvei terlebih dahulu. Karena bantuan ini bukan cuma-cuma tetapi harus mengembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Jika dipandang memenuhi kriteria sesuai yang dipersyaratkan, maka akan diberikan bantuan. Ada sebagian juga pelaku UMKM yang belum melunasi cicilan pengembalian modal dengan alasan usahanya macet.” (hasil wawancara, 4 Oktober 2017).

Berdasarkan pendapat beberapa informan diatas memperlihatkan bahwa pemberian modal usaha melalui kredit bergulir di Kabupaten Malinau, sangat membantu para pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha. Meskipun tidak semuanya mampu berkembang tetapi sebagian besar pelaku usaha industri kecil dalam perkembangannya mampu mengembangkan usahanya. Dengan demikian pemberian bantuan modal usaha melalui pinjaman kredit bergulir herimplikasi terhadap pengembangan usaha industri kecil. Sedangkan beberapa pelaku usaha yang kurang berhasil dalam mengembangkan usaha disebabkan oleh faktor kemampuan, dan keterampilan yang terbatas sehingga tidak mampu mengelola modal usaha secara tepat.

2. Bantuan Sarana Produksi

Sarana/peralatan produksi bagi pelaku IKM sangat membantu dalam melakukan proses produksi, karena dengan sarana produksi yang lengkap maka akan meningkatkan jumlah kapasitas produksi yang lengkap yang dihasilkan sehingga mampu memenuhi pesanan. Dinas Perindag Kab. Malinau telah memberikan berbagai macam peralatan produksi sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Bantuan Peralatan Produksi Disperindag 2012-2016

No	Nama Alat	Jumlah
1	Mesi Jahit Manual	20 Unit
2	Mesin Jahit Listrik	35 Unit
3	Mesin Obras	15 Unit
4	Alat Pembuat Bahan Kerajinan	5 Set
5	Alat Pengolah Dodol	2 Unit
6	Alat Pengolah Kripik	1 Unit
7	Alat Pengolahan Makanan Tradisional	10 Set
8	Mesin Pres Kemasan + Kemasan	2 Paket
9	Mesin Pembelah Ubi Kasar	3 Unit
10	Mesin Penepung	3 Unit
11	Mesin Pemipil Jagung	2 Unit
12	Mesin Penggiling Jagung	2 Unit
13	Perlengkapan Pertukangan dan Ukiran	5 Set
14	Mesin Pengupas Kulit Kopi	6 unit
15	Mesin Penyaring Kopi Kasar dan Hiaus	6 Unit
16	Alat Pembuat Perahu	1 Set
17	Perlengkapan Perbengkelan	2 Paket
18	Perlengkapan Service Elektronik	2 Paket
19	Perlengkapan Las	2 Paket
20	Perlengkapan Peralatan Pandai Besi	7 Set
21	Alat Gilingan Tepung	5 Unit
22	Alat Pengering Kripik	10 Buah
23	Perlengkan Pembuat Kue	5 Set

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016

Berdasarkan observasi bahwa bantuan peralatan produksi bagi pelaku IKM secara umum sangat bermanfaat, namun masih ada peralatan yang mangkrak tidak difungsikan oleh IKM. Sebagaimana hasil wawancara dengan IKM pengrajin sebagai berikut :

“...saya telah mendapatkan bantuan peralatan kerajinan, namun sayang sekali alat tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan peralatan tersebut tidak bisa digunakan untuk meraut rotan karena hasilnya tidak halus.” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

Pendapat lain juga lain juga disampaikan oleh salah satu IKM kopi bubuk dalam pendapatnya mengenai bantuan peralatan produksi mengatakan bahwa :

“...Saya mendapat bantuan peralatan sangrai dari Dinas Perindag, menurut saya peralatan ini sangat membantu dan bermanfaat. karena selama ini saya masih menggunakan peralatan manual untuk menyangrai kopi. Dengan adanya bantuan peralatan tersebut produksi kami meningkat.” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

c. Memberikan Fasilitas Pemasaran Melalui Promosi/Pameran

Salah satu upaya Dinas Perindag Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pemasaran produk IKM adalah dengan melaksanakan kegiatan promosi/pameran, kegiatan ini di lakukan 3 kategori lokasi wilayah pelaksanaan yaitu : pameran tingkat lokal Kabupaten Malinau , tingkat regional propinsi dan tingkat nasional yang dilaksanakan diluar daerah. Pelaksanaan promosi/pameran berdasarkan kategori lokasi wilayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Data Pelaksanaan Promosi/Pameran Dinas Perindag Kab. Malinau
Tahun 2012 – 2016

No	Nama Pameran	Lokasi Pameran	Jumlah IKM
1.	Pameran ERAU Tenggarong	Tenggarong	6 IKM
2.	Pameran dan Promosi Produk Unggulan Kabupaten Malinau	Samarinda Batam Jakarta	10 IKM
3.	Pameran dan Promosi Produk Unggulan Kabupaten Malinau	Malinau	7 IKM
4.	Pameran Dekopindo	Malinau Batam	4 IKM
5.	Pameran Bulan Bakti	Malinau	10 IKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016

Kegiatan promosi/pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Kab. Malinau adalah salah satu kegiatan yang sangat digemari dan diminati oleh pelaku IKM, apalagi kalau promosi/pameran dilaksanakan diluar daerah. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku IKM sangat senang dengan adanya kegiatan pameran yang melibatkan IKM, karena kegiatan promosi/pameran adalah kesempatan yang baik untuk memperoleh penjualan secara maksimal. Disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh oleh IKM pada saat pameran adalah menjalin kerja sama pemasaran dan bahan baku, serta dapat melihat, membandingkan dan mengadopsi inovasi produk yang ditampilkan daerah lain. Sebagaimana hasil wawancara dengan IKM kerajinan batik sebagai berikut :

“...pameran sangat bermanfaat bagi kami, karena setiap pameran yang saya ikuti, hampir semua produk yang saya bawa disaat pameran habis terjual. Disamping itu manfaat yang saya peroleh di saat pameran adalah bisa melihat dan mengadopsi produk IKM

daerah lain baik dari segi desain produk maupun inovasi produk.” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh IKM kerajinan tas sebagai berikut :

“...menurut saya pameran sangat banyak manfaatnya karena beberapa pameran yang saya ikuti baik yang difasilitasi Disperindag Malinau maupun Disperindagkop Provinsi, hampir semua produk yang saya bawa disaat pameran habis terjual. Dan biasanya ada yang memesan produk saya serta dengan adanya pameran dapat memperluas jaringan penjualan produk kerajinan Malinau.” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

Secara implementatif kegiatan promosi/pameran ini sangat membantu dalam peningkatan promosi serta penjualan produk IKM Kab. Malinau, namun hasil yang dicapai dari pasca pelaksanaan pameran belum maksimal. Sebagaimana hasil wawancara dengan IKM batik Malinau sebagai berikut :

“...Kegiatan pameran yang pernah saya ikuti adalah pameran tingkat provinsi di Samarinda, hasil penjualan produk yang saya dapatkan disaat pameran lumayan besar, namun setelah pasca pameran hasil penjualan kami tetap seperti biasa tidak ada peningkatan..” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Bina Industri Kecil dan TTG bahwa :

“... Sebenarnya tujuan utama pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran adalah untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk IKM, sehingga terjadi kerjasama di bidang pemasaran. Jadi pada intinya adalah bukan hanya pada saat pameran saja penjualan meningkat, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana setelah pasca pameran penjualan produk IKM tetap meningkat dan kerjasama pemasaran berlanjut.” (hasil wawancara, 2 Oktober 2017).

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, terdapat beberapa faktor yang menghambat adalah :

- a. Kurangnya aparat pembina IKM khususnya Tenaga Penyuluh Lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dan sebagian pegawai yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.
- b. Terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM, sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana.
- c. Adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja, sehingga apapun yang diinginkan untuk mengembangkan usahanya selalu mengharap bantuan dari pemerintah.
- d. Karakteristik dan pola pikir pelaku tidak mudah untuk berubah.
- e. Kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Kondisi geografik Kabupaten Malinau

C. Pembahasan

Masalah yang membuntuti IKM cukup beragam, secara umum IKM memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, namun dalam kenyataan masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangannya. Dalam hal ini, diantaranya adalah (a) kelemahan akses dan perluasan pangsa pasar, (b) kelemahan akses dalam pemupukan modal, (c) kelemahan akses pada informasi dan teknologi, (d) kelemahan dalam organisasi dan manajemen, serta (e) kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Kesemuanya ini bersumber dari kelemahan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada rendahnya kualitas produk dan jasa sehingga kurang memiliki daya saing, baik dalam pasar lokal maupun nasional dan internasional (Prawirokusumo 1999). Selain itu Husen (2005) mengutip Hafshah melihat permasalahan internal yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi (a) rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha; (b) keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar; dan (c) kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Sedangkan permasalahan eksternal yakni: (a) iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil; (b) kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan; (c) kurangnya dukungan; dan (d) masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan berbagai upaya dalam membina pelaku industri kecil dan menengah yaitu melalui kegiatan pelatihan, promosi/pameran,

bantuan modal, bantuan sarana produksi. Namun berbagai upaya pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku IKM selama ini.

Sesuai fokus penelitian yang ditetapkan tentang Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dan Faktor-faktor yang menghambat pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau. Untuk mendapat gambaran yang lebih mendalam penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu untuk menganalisis secara mendalam tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah. Berdasarkan fokus penelitian yang dirumuskan, maka penulis akan mendeskripsikan sesuai sub fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

a. Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan /SDM Melalui Pelatihan

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pelatihan adalah Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright (2003:251) mengemukakan, pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. Pengertian lain menurut Gomes (2003:197), pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi

tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Dilihat dari banyaknya pelatihan yang diikuti oleh pengelola usaha industri kecil dan menengah sangat mendukung untuk pengembangan usaha karena banyak jenis pelatihan yang diberikan mencakup operasionalisasi usaha industri kecil dan menengah, sehingga akan memudahkan para pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Tetapi dari segi jumlah tenaga yang diberikan kesempatan mengikuti pelatihan nampaknya belum mencakup secara keseluruhan dan masih banyak yang belum mengikuti pelatihan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber yang kompeten mengenai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Kabupaten Malinau, ternyata ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam pelatihan belum sepenuhnya diaplikasikan secara maksimal. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab adalah :

- Tingkat pendidikan pelaku IKM yang rendah, sehingga agak kesulitan untuk menyerap materi pelatihan;
- Peserta yang mengikuti pelatihan terkadang tidak sesuai dengan jenis usahanya, sehingga ilmu yang didapatkan tidak dapat diterapkan lebih lanjut;
- Waktu pelaksanaan pelatihan yang singkat sehingga materi pelatihan dipadatkan.

- Kualitas produk yang dihasilkan pasca pelatihan belum maksimal, sehingga kurang diminati konsumen yang pada akhirnya produksi macet.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (1991: 53), pelaksanaan program pelatihan dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri peserta pelatihan tersebut terjadi suatu proses transformasi dalam : (a) peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas, (b) perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin dan etos kerja.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau sudah beragam dan sangat bermanfaat bagi pelaku IKM, karena dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman kepada pelaku IKM baik dari segi kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial. Akan tetapi dari segi hasil yang diperoleh pasca pelatihan sebagian besar pelaku IKM belum dapat mengaplikasikan secara maksimal.

Hasil wawancara dari IKM bahwa pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau sangat bermanfaat karena dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait desain produk. Namun hasil yang dicapai setelah pasca pelatihan juga belum diaplikasikan secara maksimal bahkan ada yang belum mengaplikasikan sama sekali. Adapun yang menjadi alasan sehingga aplikasi ilmu keterampilan yang diperoleh pasca pelatihan tidak terlaksanakan adalah: Faktor bahan baku yang tidak tersedia di Malinau dan harus membeli dari Pulau Jawa.

Mencermati fenomena tersebut maka perlu adanya evaluasi secara mendalam oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau selaku instansi pembina, terkait hasil yang dicapai setelah pasca pelatihan. Adapun hal-hal yang perlu dievaluasi adalah bagaimana melakukan perencanaan yang baik terhadap IKM yaitu meliputi indentifikasi terhadap jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh IKM, kemudian dari segi materi yang akan disampaikan harus sesuai dengan skala IKM yang akan mengikuti pelatihan. Sedangkan untuk pelatihan teknis, jenis pelatihan yang akan dilaksanakan seharusnya menyesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Malinau sehingga dengan demikian setelah pasca pelatihan tidak ada alasan lagi untuk tidak mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam pelatihan karena faktor bahan baku yang sulit didapatkan, karena bahan baku sudah tersedia di Kabupaten Malinau sesuai potensi. Kondisi seperti ini yang perlu dibenahi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Malinau, supaya tidak hanya sekedar menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana tetapi harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mendasar terkait peningkatan SDM bagi pelaku IKM. Dengan demikian pelaku IKM dapat merasa puas atas pelatihan yang diberikan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diberikan yang ada pada akhirnya dapat berimbas terhadap peningkatan dan perkembangan pelaku IKM.

b. Memberikan Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi

1. Bantuan Modal Melalui Dana Bergulir

Berdasarkan hasil observasi bahwa bantuan modal bergulir oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk sementara disetop, yaitu sejak dari tahun 2016 hingga saat ini belum dapat disalurkan kepada pelaku UMKM, karena sambil menunggu proses pengembalian dana bergulir dari tahun 2013. Bantuan Dana Bergulir Pemda Malinau sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku IKM, karena tidak ada bunga dan jaminan sangat membantu IKM dalam mengembangkan usahanya. Bantuan permodalan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk memberdayakan kepada pelaku IKM yang ada di Kab. Malinau.

Dikarenakan bantuan modal sangat besar manfaatnya bagi pelaku IKM, maka perlu upaya pemerintah Kab. Malinau untuk segera menggulirkan kembali penyaluran pinjaman modal bergulir bagi IKM agar pelaku IKM dapat segera terbantu dalam mengembangkan usahanya, hal ini dikarenakan pelaku usaha IKM sangat sulit untuk meminjan modal di Bank.

Menurut Sumodiningrat, keengganan pihak perbankan komersial menyalurkan kredit kepada usaha kecil karena anggapan kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin sangatlah tidak bankable (Sumohadiningrat 2003). Hal itu karena pihak perbankan memandang pelayanan terhadap masyarakat miskin hanya mendatangkan biaya transaksi

tinggi dan penuh dengan risiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan terlalu kecil untuk bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan, ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah, dan kenyataan bahwa jarak lembaga keuangan dengan mereka demikian jauh. Di luar itu, bagi UKM sendiri, bukan hanya ketiadaan agunan yang menyebabkan mereka sulit memperoleh layanan perbankan, tetapi juga aspek legal formal dari itu sendiri. Belum lagi masalah keluwesan yang menjadi ciri sekaligus kekuatan UKM yang sulit diikuti oleh fleksibilitas fasilitas lembaga keuangan konvensional.

2. Bantuan Sarana Produksi

Hasil observasi di lapangan bahwa bantuan sarana produksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malinau sangat membantu pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas produknya. Namun demikian masih terdapat permasalahan terkait pemberian peralatan produksi kepada IKM yaitu masih terdapat peralatan yang diberikan kepada IKM tidak dapat difungsikan, dikarenakan peralatan tersebut kurang bagus kualitasnya, disamping itu terdapat juga peralatan tidak dapat difungsikan oleh IKM karena memerlukan daya listrik yang besar, sementara daya listrik yang dimiliki IKM ampunya kecil.

Mencermati fenomena tersebut maka hal ini menjadi bahan evaluasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malinau dalam memberikan bantuan sarana mengenai peralatan yang dibutuhkan

oleh pelaku IKM, sehingga peralatan yang diberikan dapat menghasilkan produk yang berkualitas sesuai yang diinginkan. Selanjutnya sebelum pengadaan peralatan dilaksanakan perlu dilakukan survey ke IKM terkait spesifikasi peralatan yang diperlukan termasuk kemampuan daya listrik yang dimiliki oleh IKM.

c. Memberikan Fasilitasi Pemasaran Melalui Promosi/Pameran.

Permasalahan yang terjadi adalah peningkatan penjualan yang didapatkan IKM hanya sebatas pada saat pameran saja, akan tetapi setelah pasca pameran tidak terjadi peningkatan penjualan. Padahal tujuan utama dilaksanakannya kegiatan pameran adalah untuk mempromosikan potensi produk unggulan serta membuka peluang investasi daerah, sehingga terjalin kerja sama di bidang pemasaran.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi atas kegiatan promosi/pameran ini. Harapan kedepan bahwa di setiap event pameran lebih selektif dalam memilih IKM yang benar-benar serius dalam mempromosikan usahanya dan bukan hanya sekedar IKM yang mau jalan-jalan saja, sehingga ilmu dan pengalaman yang didapat IKM tersebut dalam pameran dapat diterapkan dalam pengembangan usahanya.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pembinaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, terdapat beberapa faktor yang menghambat adalah :

- a. Kurangnya aparat pembina IKM khususnya Tenaga Penyuluh Lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dan sebagian pegawai yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Aparat Pembina IKM yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau sebagian memiliki basic/tingkat pendidikan yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya, misalnya tenaga penyuluh perindustrian terdapat basic pendidikan sarjana ekonomi, padahal secara spesifik basic pendidikan untuk seorang penyuluh perindustrian seharusnya memiliki basic pendidikan sarjana teknik industri. Begitu pula dengan tenaga pendamping IKM minimal memiliki pendidikan Diploma (D3). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi seorang Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping terdapat uraian tugas yang secara spesifik harus diterapkan dalam pembinaan IKM, yaitu dengan melakukan identifikasi permasalahan serta memberikan solusi baik secara teknis maupun secara manajerial dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah, disamping itu tenaga penyuluh harus menguasai materi penyuluhan terkait perindustrian. Oleh karena itu perlu adanya

penyesuaian basic/tingkat pendidikan terhadap aparat Pembina IKM guna tercapainya sasaran pembinaan yang diinginkan..

- b. Terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM, sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana. Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan. Program kegiatan tahunan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau sudah terencana dalam suatu dokumen Rencana Strategik yang meliputi jenis kegiatan, besaran anggaran, output dan outcome dari setiap kegiatan. Namun dari setiap program kegiatan yang ada dalam Rencana Strategik tidak serta merta dapat terlaksana karena disebabkan faktor anggaran yang terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa ditunda di tahun berikutnya.
- c. Adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja, sehingga apapun yang diinginkan untuk mengembangkan usahanya selalu mengharap bantuan dari pemerintah. Sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja tersebut, merupakan masalah yang umum sering terjadi bagi sebagian pelaku IKM yaitu mereka tidak mampu untuk berusaha secara mandiri dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Salah satu contoh adalah, ketika suatu IKM difasilitasi untuk mengikuti pameran dengan biaya ditanggung oleh pemerintah, maka untuk mengikuti pameran selanjutnya tidak punya inisiatif untuk mengikuti dengan biaya sendiri akan tetapi selalu mengharap difasilitasi oleh pemerintah, sementara masih ada IKM lain yang belum pernah mendapat fasilitas.

- d. Karakteristik dan pola pikir pelaku tidak mudah untuk berubah. Karakteristik dan pola pikir pelaku IKM yang tidak mudah untuk berubah merupakan masalah klasik bagi IKM, yaitu selalu mempertahankan proses produksi dengan pola-pola lama yang dilakukan secara turun temurun. Contohnya masih adanya penggunaan kemasan produk yang masih sederhana, alasannya dengan kemasan sederhana tersebut produknya tetap laku dan biaya produksinya kecil.
- e. Kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan penelitian lapangan bahwa beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tidak tepat sasaran, contohnya bantuan peralatan perbengkelan dan peralatan anyaman tidak dapat dimanfaatkan oleh IKM karena hasil yang diperoleh dari penggunaan alat tersebut kualitasnya kurang bagus. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan secara matang sebelum pengadaan peralatan IKM tersebut dilaksanakan.
- f. Kondisi geografik Kabupaten Malinau. Kondisi wilayah Kab. Malinau yang luas dapat menjadi penghambat dalam pembinaan IKM dikarenakan akses kewilayah pedalaman hanya 7 Kecamatan yang dapat ditempuh dengan jalur darat sisanya harus menggunakan jalur sungai dan pesawat udara. Sehingga jarang sekali Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan ke Kecamatan pedalaman dikarenakan memerlukan biaya yang sangat besar dan medan yang sulit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum bahwa pelaksanaan pembinaan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau belum optimal hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan pelatihan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. bantuan modal bergulir tidak menghasilkan peningkatan usaha IKM yang signifikan, bantuan peralatan produksi tidak meningkatkan kualitas dan jumlah produksi, promosi/pameran belum meningkatkan jumlah hasil penjualan.
2. Faktor faktor yang menghambat terhadap pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau adalah: Terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga apapun yang diinginkan selalu mengharap bantuan dari pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan, Kondisi geografik Kabupaten Malinau.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pembinaan hendaknya aspek sumber daya manusia menjadi fokus penting yang harus diperhatikan, untuk masalah permodalana, pemerintah hendaknya memberikan rekomendasi kredit yan mudah dijangkau oleh pelaku usaha melalui kerja sama dengan pihak perbankan.
2. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau hendaknya melakukan evaluasi secara mendalam terhadap program kegiatan yang sudah berjalan. Guna tercapainya target pembinaan IKM secara berkelanjutan dan tepat sasaran, maka perlu dibuat suatu perencanaan berupa penyusunan master plan pembinaan IKM.
3. Sebaiknya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau lebih memperhatikan setiap pelaku IKM yang harus dan wajib dibantu dengan lebih teliti hingga tidak ada lagi kesalahan dan penyimpangan pada tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2016. *Malinau Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau.
- _____, 2016. *LAKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Malinau*.
- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dye, Thomas R, 1975. *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition. New York: Eanglewood Cliff.
- Etty Puji Lestari, 2010. Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 6, Nomor 2, September 2010, 146-157.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politic and policy Implementation in The Third Word*, Princeton University Press, New Jersey.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw Hill.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikas.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright, 2003, *Human Resource Management, International Edition*, The McGraw-hill Companies, Inc. New York.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom Up Approaches to Implementation Research" *Journal of Publik Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Samodra Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suandi. I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01. Bali: Universitas Udayana.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2009. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan kebijakan Publik*. Jakarta Sinar Grafika, 1994.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Tulus Tambunan. 2002. Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan Prospeknya. *Manajemen Usahawan Indonesia*, no.7/ TH.XXXI Juli 2002.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*: Jakarta Media Pressindo.
- , 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*: Jakarta Media Pressindo.
- , 2016. *LAKIP Dinas Perindustrian Perdagangan*

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PANDUAN WAWANCARA KEPADA INFORMAN

I. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Bidang Usaha :
4. Alamat :

II. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PELAKU INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1. Bidang usaha apa yang Anda kembangkan selama ini ?
2. Apakah usaha yang Anda kembangkan memiliki cukup modal ?
3. Adakah keluhan Anda dalam upaya pengembangan usaha Anda ?
4. Bagaimana keterlibatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam pengembangan usaha Anda ?
5. Pernahkah Anda mengikuti Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau? Kalau pernah pelatihan apa ? Dan apa manfaatnya bagi perkembangan usaha Anda ?
6. Apakah Anda pernah menerima bantuan Modal dari Pemerintah Malinau ? dan Bagaimana menurut Anda mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau yang memberikan pinjaman modal untuk mendukung pengembangan usaha Anda ?
7. Apakah Anda pernah menerima bantuan sarana produksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau ? dan Bagaimana menurut Anda mengenai bantuan sarana produksi ?
8. Apakah Anda pernah mengikuti pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau ? dan apa manfaatnya bagi pengembangan usaha Anda ?

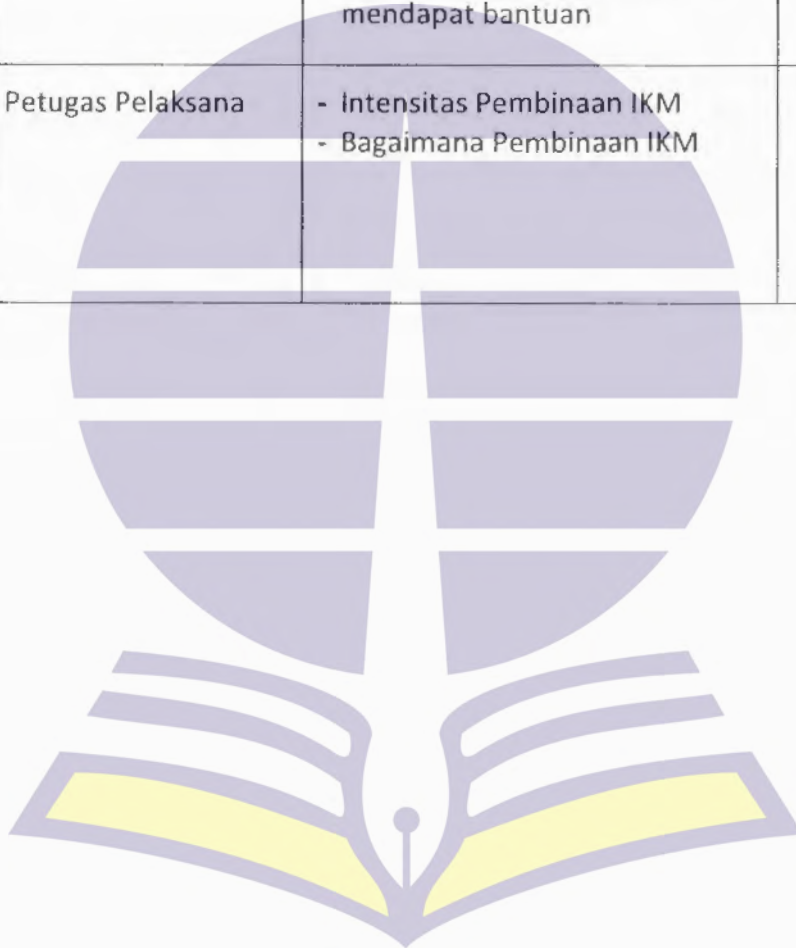
III. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PETUGAS PELAKSANA

1. Bagaimana keterlibatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dalam pengembangan IKM di Kabupaten Malinau ?
2. Pelatihan apa yang pernah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau ?
3. Apakah ada bantuan Modal dari Pemerintah Malinau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau terhadap pelaku IKM ?
4. Apakah ada bantuan sarana produksi dari Pemerintah Malinau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau terhadap pelaku IKM ?
5. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau pernah mengikutkan para pelaku IKM dalam kegiatan pameran/promosi ?
6. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau memfasilitasi pelaku IKM untuk mengurus sertifikat usaha mereka ?



PANDUAN OBSERVASI PENELITIAN

No	Komponen	Informasi Yang Ingin Diketahui	Keterangan
1	Pelaku IKM	<ul style="list-style-type: none">- Kondisi Usaha- Perubahan Usaha setelah mendapat bantuan	
2	Petugas Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Intensitas Pembinaan IKM- Bagaimana Pembinaan IKM	



PANDUAN PENGUMPULAN DOKUMEN PENDUKUNG

No	Komponen	Dokumen	Informasi Yang Ingin diketahui
1	Disperindag	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Renstra - Lakip - RPJMD 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Bantuan IKM - Pelaksana Pembina IKM - Peran Disperindag dalam Pembinaan IKM di Kab. Malinau
2	Pelaku IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Bantuan yang pernah diterima
3	BPS Kab. Malinau	<ul style="list-style-type: none"> - Malinau Dalam Angka 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi penduduk Kab. Malinau saat ini



Wawancara Dengan Kabid Industri dan TTG



Wawancara Dengan Kasie Bina Industri Kecil dan TTG



Wawancara Dengan Kasi Bina UMKM dan Permodalan



Wawancara Dengan IKM Batik



Wawancara Dengan IKM Kopi



Wawancara Dengan IKM Rotan

